PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, TEMUAN AUDIT, UMUR PEMERINTAH DAERAH, SPESIALISASI PEKERJAAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

Oleh:

Faisal Akmal Sani

17312400

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, TEMUAN AUDIT, UMUR PEMERINTAH DAERAH, SPESIALISASI PEKERJAAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII)

Oleh:

Faisal Akmal Sani

17312400

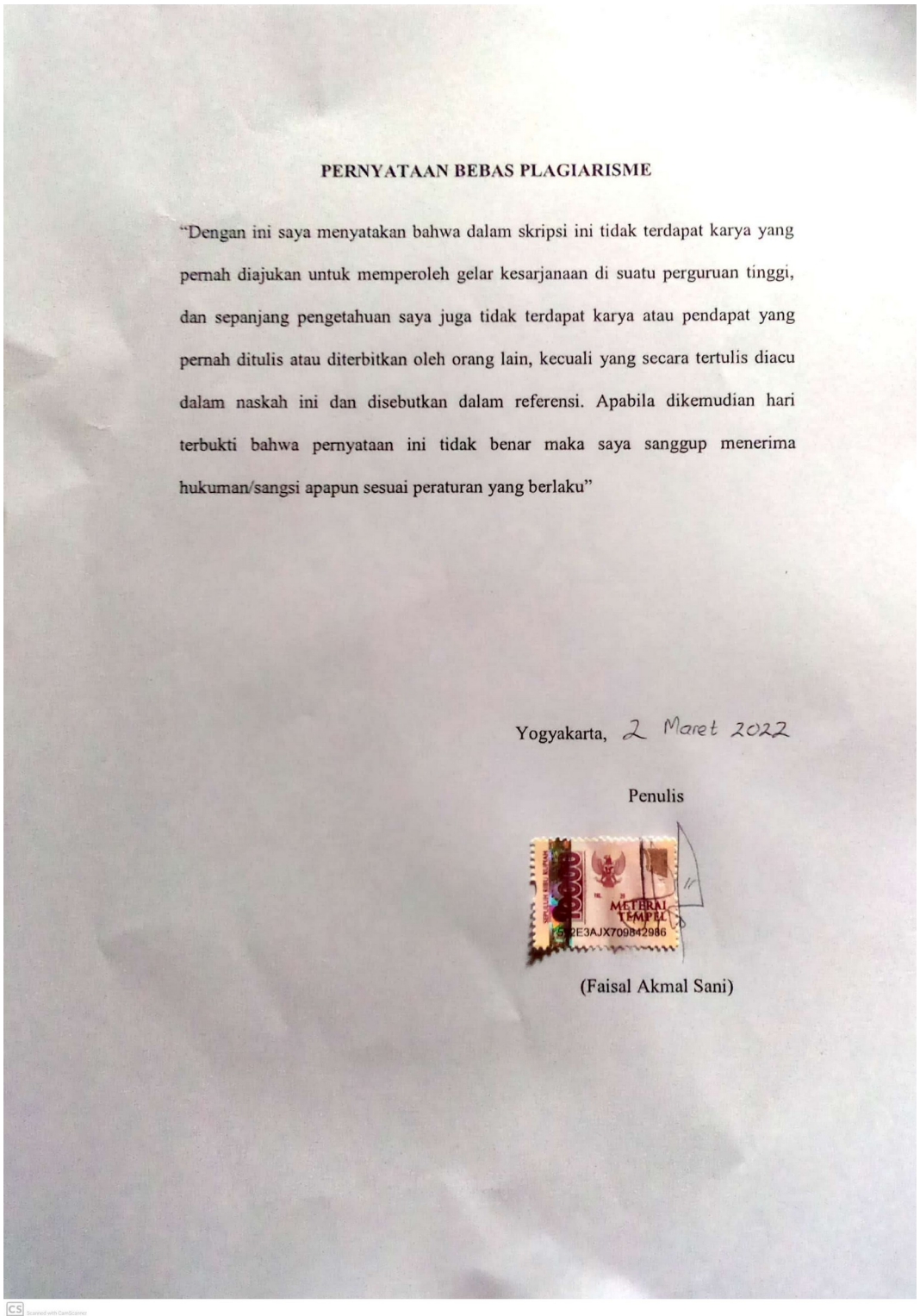
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 2 Maret 2022

Penulis

(Faisal Akmal Sani)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, TEMUAN AUDIT, UMUR PEMERINTAH DAERAH, SPESIALISASI PEKERJAAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

Oleh:

Faisal Akmal Sani

17312400

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 22-02-2222

Dosen Pembimbing,



(Johan Arifin, SE, M.Si., Ph.D)

BERITA ACARA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2021/2022, hari Rabu, tanggal 06 April 2022, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama	: FAISAL AKMAL SANI
NIM	: 17312400
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Intergovernmental Revenue, Temuan Audit, Umur Pemerintah Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dosen Pembimbing	: Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A

Referensi : Tidak Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra. .....

Anggota Tim : Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D. .....

Yogyakarta, 19 April 2022
Ketua Program Studi Akuntansi,

Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA
NIK. 023120104

HALAMAN MOTTO

“never compare your beginning to anyone’s middle”

“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berhadap”

(QS Asy Syarh: 8)

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri”

(QS Ar Rad: 11)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, nikmat, rahmat, dan karunia-Nya serta diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, TEMUAN AUDIT, UMUR PEMERINTAH DAERAH, SPESIALISASI PEKERJAAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH".** Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana untuk mendapatkan gelar sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini disusun tidak lepas dari bimbingan, bantuan, doa dari berbagai pihak sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melewati hambatan dan tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan mendapatkan kemudahan serta kelancaran.
2. Orang tua penulis yang tercinta dan penulis hormati: Bapak **Abdul Kholiq** dan Ibu **Endang Dwi Astuti** yang senantiasa selalu mendoakan setiap saat dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Kakak-kakak penulis **Novi Rosita** dan **Fitria Rahmawati** yang juga selalu mendukung dan mendoakan penulis.
4. Bapak **Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D** selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dan memberikan saran serta arahan selama proses penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak **Prof. Jaka Sriyana, M.Si, Ph.D** selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. **Fitra Januar Rizky, Raniyah Aulihati Gonggo, Najla Chirielda, Maulidya Khoiriya, Andre Hasta Pradhana, Adhitya Priambodo, Nurulita Ayu, Andiet Yoga Pamungkas** selaku anggota grup "UNF(UCK)AEDAH" teman dalam kondisi apapun selama perkuliahan yang memberikan bantuan dan menemani penulis dalam hal akademik maupun non akademik.
7. **Eliezer Andreas Laksmana, Widhias Setyojati, Bayu Muhammad Aslam, Arif Lukman Hakim, Muhammad Yusril Al-Faqih** selaku sahabat dari penulis sejak SMA hingga tinggal di kontrakan bersama yang

dipenuhi dengan emosi ketika berada satu atap bersama dan teman teman yang bertamu ke kontrakan silih berganti.

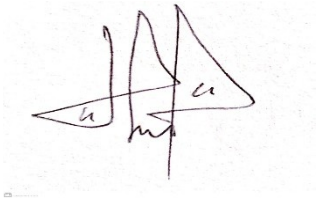
8. Teman grup “Clowny” : **Dea Raekinsa, Yoan Ayu Resta Basuki, Rizaldi al-Fatah, Hilda Rahmawan** yang telah mengajak penulis tamasya ketika penulis bingung saat mengerjakan skripsi.
9. Teman teman grup seperbimbingan dari Pak Johan yang telah berdiskusi bersama ketika penulis bingung mengenai skripsi.
10. Seluruh pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terkait penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah mendukung secara materi maupun non materi dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kesalahan dari penulis. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2022

Penulis,



Faisal Akmal Sani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN JUDUL.....ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....iii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
BERITA ACARA.....v
HALAMAN MOTTO.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TABEL.....xii
DAFTAR GAMBAR.....xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....xiv
ABSTRAK.....xv
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....6
1.3 Tujuan Penelitian.....6
1.4 Manfaat Penelitian.....7
BAB II.....9
KAJIAN PUSTAKA.....9
2.1 Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.....9
2.2 *Stakeholder Theory*.....10
2.3 Teori Institusional.....12
2.4 *Intergovernmental Revenue*.....14
2.5 Temuan Audit.....15
2.6 Umur Pemerintah Daerah.....17
2.7 Spesialisasi Pekerjaan.....17
2.8 Jumlah Penduduk.....18
2.9 Penelitian Terdahulu.....19

2.10 Kerangka Konsep....21
2.11 Pengembangan Hipotesis....22
2.11.1 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....22
2.11.2 Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....24
2.11.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....25
2.11.4 Pengaruh Spesialisasi Pekerjaan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....26
2.11.5 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....29
BAB III....31
METODE PENELITIAN....31
3.1 Populasi dan Sampel....31
3.1.1 Populasi....31
3.1.2 Sampel....31
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data....32
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional....32
3.3.1 Variabel Dependen....32
3.3.2 Variabel Independen....33
3.3.3 Variabel Kontrol....36
3.4 Model dan Alat Analisis Penelitian....38
3.5 Analisis Deskriptif....38
3.6 Analisis Regresi Berganda....39
3.6.1 Uji Normalitas....39
3.6.2 Uji Multikolinieritas....40
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas....40
3.7 Uji Hipotesis....40
3.7.1 Uji Nilai t....40
BAB IV....42
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN....42
4.1 Deskripsi Objek Penelitian....42

4.2 Analisis Deskriptif....43
4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik....45
4.3.1 Uji Normalitas....46
4.3.2 Uji Multikolinearitas....46
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas....48
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda....49
4.4.1 Uji T....51
4.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis....55
4.5.1 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....55
4.5.2 Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....57
4.5.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....59
4.5.4 Pengaruh Spesialisasi Pekerjaan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....61
4.5.5 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....63
BAB V....65
PENUTUP....65
5.1 Kesimpulan Penelitian....65
5.2 Saran....66
DAFTAR PUSTAKA....68
LAMPIRAN....73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....21

Tabel 4. 1 Hasil data SPSS, 2022 43

Tabel 4. 2 Hasil data SPSS, 2021.....44

Tabel 4. 3 Hasil data SPSS, 2021.....45

Tabel 4. 4 Hasil data SPSS, 2022.....46

Tabel 4. 5 Hasil data SPSS, 2022.....48

Tabel 4. 6 Hasil data SPSS, 2022.....49

Tabel 4. 7 Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah.....58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep.....22

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....73
LAMPIRAN 2.....74
LAMPIRAN 3.....77
LAMPIRAN 4.....80
LAMPIRAN 5.....83
LAMPIRAN 6.....86
LAMPIRAN 7.....89
LAMPIRAN 8.....92
LAMPIRAN 9.....95
LAMPIRAN 10.....98
LAMPIRAN 11.....101
LAMPIRAN 12.....103
LAMPIRAN 13.....104

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *intergovernmental revenue*, temuan audit, umur pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah se Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan pemerintah daerah se Pulau Jawa dengan sampel laporan keuangan pada tahun 2018. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 90 laporan keuangan menggunakan metode *random sampling*. Hasil penelitian yang diperoleh menggunakan aplikasi IBM SPSS menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, *intergovernmental revenue*, temuan audit, umur pemerintah daerah, dan spesialisasi pekerjaan masing-masing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *intergovernmental revenue*, temuan audit, umur pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, jumlah penduduk, tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to test empirically about the influence of intergovernmental revenue, audit findings, the age of local governments, job specialization, and population numbers against the level of disclosure of local government financial statements in Java Island. This study used the population of local government financial statements in Java Island with a sample of financial statements in 2018. The number of samples taken in this study as many as 90 financial statements using random sampling methods. The results of the study obtained using the IBM SPSS application showed that the population had a significant and positive effect on the level of disclosure of local government financial statements. However, intergovernmental revenue, audit findings, the age of local governments, and the specialization of their respective occupations had no significant effect on the level of disclosure of government financial statements.

Keywords: *intergovernmental revenue, audit findings, age of local government, job specialization, population number, disclosure rate of local government financial statements.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia ada istilah yang dikenal dengan otonomi daerah yang sudah ada sejak awal era reformasi sekitar tahun 2000-an. Otonomi daerah diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri sebagai bentuk desentralisasi dari pemerintah pusat. Otonomi daerah didefinisikan sebagai bebas atau mandiri tapi bukan mendapatkan kemerdekaan melainkan bebas dengan batasan tertentu atau mandiri yang didapatkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Syamsuddin (2005) memaparkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan-kebijakan publik pemerintah daerah serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berisi reformasi pada sektor ekonomi dan keuangan yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peraturan dan perundang-undangan disusun berkaitan dengan responsibilitas atau akuntabilitas pemerintah utamanya dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan pada pemerintahan daerah dan beberapa faktor yang memengaruhinya penting untuk dilakukan. Alasannya karena pengungkapan laporan keuangan yang bersumber dari Catatan Atas Laporan Keuangan memuat poin-poin penjelasan pos-pos akun dari laporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, pengungkapan laporan keuangan menjadi sarana akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah unsur pokok yang cukup vital dalam perwujudan *good governance* di mana pemerintah bertugas untuk melaporkan hasil dari program-program yang telah diselesaikan karena masyarakat perlu mengetahui dan dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya menjadi sarana pertanggungjawaban akuntabilitas namun meliputi sudut pandang kemudahan pemegang kendali untuk mendapatkan informasi yang pada akhirnya aktivitas akuntabilitas timbul keterbukaan dalam lingkungannya (Sulistiyani, 2011 dalam Hanifah, 2015).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012) menyatakan bahwa kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa dari sembilan variabel independen yang diuji, hanya empat variabel independen yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD pada tahun 2008-2009, yaitu

ukuran legislatif, umur administratif Pemda, kekayaan Pemda, dan *intergovernmental revenue*. Penelitian serupa dilakukan oleh Simbolon dan Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa hanya ukuran pemerintah saja yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Priharjanto dan Wardani (2016) menyatakan bahwa hanya opini audit yang berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa beberapa variabel seperti *intergovernmental revenue*, temuan audit, dan umur pemerintah daerah daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Penelitian yang dilakukan oleh Priharjanto dan Wardani (2016) menyatakan hasil yang sama bahwa *intergovernmental revenue* dan temuan audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah. Penelitian serupa dengan variabel *intergovernmental revenue*, umur pemerintah daerah, dan spesialisasi pekerjaan yang dilakukan oleh Simbolon dan Kurniawan (2018) mendapatkan hasil bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2017) mengungkapkan bahwa *intergovernmental revenue* atau dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan tetapi berbeda dengan variabel spesialisasi pekerjaan pada penelitian tersebut menyatakan

bahwa spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) variabel umur daerah mendapatkan hasil berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Variabel jumlah penduduk pada penelitian Hilmi dan Martani (2012) serta Priharjanto dan Wardani (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Berkaitan dengan variabel dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa beberapa variabel terkait tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini berusaha membuktikan kembali variabel-variabel terkait seperti *intergovernmental revenue*, temuan audit, umur pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, dan jumlah penduduk dapat memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan secara signifikan.

Pembuktian variabel-variabel pada penelitian ini didukung dengan penggunaan beberapa teori. *Stakeholder theory* digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen dalam menaikkan nilai perusahaan dan meminimalisir dampak kerugian yang akan muncul di masa yang akan datang. Variabel *intergovernmental revenue* dan temuan audit berkaitan dengan *stakeholder theory*. *Intergovernmental revenue* yang termasuk dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer pada pemerintah daerah harus memiliki informasi mengenai penggunaan dana tersebut dan menyajikan informasi kepada *stakeholder*. Di sisi lain,

variabel temuan audit dengan sistem pengendalian internalnya memengaruhi nilai sebuah entitas, semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam suatu entitas rendah sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengendalian internal yang akan memengaruhi pengambilan keputusan *stakeholder*.

Definisi teori institusional merupakan proses perubahan organisasi akibat tekanan lingkungan kerja yang membentuk organisasi. Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan berkaitan dengan teori institusional. Variabel *intergovernmental revenue* dan temuan audit mendapatkan tekanan dari *stakeholder* untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan aktivitas yang telah dilakukan organisasi. Lama umur pemerintah daerah juga memengaruhi kinerja dari penyampaian informasi dan pengelolaan keuangan. Semakin lama umur pemerintah daerah, maka tekanan yang diterima organisasi dapat di atasi dengan pengalaman seiring berjalannya waktu sehingga membentuk karakteristik organisasi sesuai dengan teori institusional. Spesialisasi pekerjaan dengan proksi pendidikan kepala daerah berpengaruh pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah karena kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi mempermudah pemerintah daerah untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan. Selain itu, semakin banyak jumlah penduduk berpengaruh pada semakin besar tuntutan layanan umum terutama dalam pengungkapan laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1) Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2) Apakah Temuan Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3) Apakah Umur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4) Apakah Spesialisasi Pekerjaan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5) Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk menguji secara empiris pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.
2) Untuk menguji secara empiris pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.

3) Untuk menguji secara empiris pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.
4) Untuk menguji secara empiris pengaruh Spesialisasi Pekerjaan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.
5) Untuk menguji secara empiris pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1) Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga peneliti dapat lebih memahami ilmu yang telah dipelajari.

2) Bagi Pemerintah Daerah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai faktor apa saja yang memengaruhi dan tidak memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan dan utamanya untuk meningkatkan kinerja dalam mengungkapkan laporan keuangan secara baik dan benar.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dana utamanya untuk kepentingan publik.

4) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, referensi ataupun tolak ukur untuk penelitian selanjutnya juga sebagai bahan untuk pengembangan pada variabel-variabel yang lebih luas obyek cakupan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Pengertian pengungkapan secara konsep merupakan bagian yang masih berkesinambungan dari laporan keuangan. Sedangkan pengertian teknis dari pengungkapan adalah tahap akhir pada proses akuntansi yang menyajikan informasi berbentuk seperangkat penuh pernyataan keuangan. Pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan sarana untuk menyampaikan informasi pada laporan keuangan sebagai bahan evaluasi entitas. Menurut Ghozali dan Chariri (2011) dalam Pandansari (2016), kata pengungkapan itu sendiri atau *disclosure* artinya tidak menutupi dan tidak menyembunyikan. Wolk, Tearney, dan Dod (2001) dalam Nainggolan (2017) menginterpretasi secara luas pengungkapan berkaitan dengan informasi dalam laporan keuangan dan komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa pasca laporan, diskusi manajemen dan analisis operasi untuk tahun yang akan datang, prakiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang mencakup pengungkapan segmental dan perluasan lebih lanjut mengenai biaya historis.

Pengungkapan dalam laporan keuangan tidak dilaksanakan tanpa tujuan yang jelas. Tujuan dari pengungkapan sebagai penyedia informasi penting dan masih terkait pada pemakai laporan keuangan dalam rangka membantu mendukung pengambilan keputusan dengan kemungkinan yang

terbaik, dengan syarat bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya (Hendriksen, 2002).

Ada beberapa tujuan pengungkapan laporan keuangan (Belkaoui, 2006), yaitu:

1) Menguraikan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.
2) Menguraikan item-item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
3) Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai risiko dan potensial dari item-item yang diakui dan tidak diakui.
4) Memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam satu tahun dan di antara beberapa tahun.
5) Memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa depan.

2.2 *Stakeholder Theory*

Istilah *stakeholder* dapat diartikan sebagai individu ataupun kelompok yang berasal dari eksternal perusahaan, badan usaha, dan pemerintah dengan kepentingan tertentu. Tujuan teori *stakeholder* yang utama adalah membantu manajemen untuk menaikkan nilai perusahaan akibat dari aktivitas-aktivitas yang telah lalu dan menurunkan

kemungkinan kerugian yang dapat muncul bagi *stakeholder*. Menurut Rokhlinasari (2016), *stakeholder* didefinisikan sebagai sekelompok atau individu yang memiliki pengaruh dan atau dipengaruhi dilandasi oleh tujuan tertentu yang ingin dicapai. Teori *stakeholder* adalah teori di mana perusahaan bukan merupakan sebuah entitas yang hanya beroperasi dan menjalankan entitas dalam rangka mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan sendiri, namun harus memperhatikan faktor-faktor lain agar *going concern* dan memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, investor, karyawan, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain) (Rokhlinasari, 2016). Teori *stakeholder* menganggap bahwa keberadaan perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*, sehingga pengambilan keputusan perusahaan juga mengandalkan persetujuan *stakeholder* tersebut. Dalam upaya menegakkan akuntabilitas keuangan publik, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang telah disusun kepada para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Informasi dari laporan keuangan berkaitan dengan penilaian pengukuran kinerja keuangan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Teori *stakeholder* memiliki beberapa hubungan dengan variabel penelitian yang digunakan. Tujuan pengungkapan laporan keuangan salah satunya untuk pengambilan keputusan oleh *stakeholder*. Selain itu berkaitan dengan *intergovernmental revenue*, pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan informasi atas penggunaan dana transfer

yang didapat dari pemerintah pusat. Hubungan teori *stakeholder* dengan temuan audit adalah tanggung jawab dari entitas pemerintah daerah terhadap aktivitas yang dilakukan agar tidak meningkatkan kerugian yang kemungkinan muncul bagi *stakeholder.*

2.3 Teori Institusional

Gagasan utama teori institusional adalah akibat dari tekanan lingkungan yang membentuk organisasi dan menyebabkan terjadinya institusionalisasi (Roen, 2011 dalam Murti dan Muafiqie, 2018). Dalam teori institusional, tekanan normatif memengaruhi organisasi yang berasal dari eksternal organisasi maupun internal organisasi (Zucker, 1987). Menurut Ashworth *et al*. (2009) tujuan utama yang mendasari perubahan organisasi adalah mendapatkan legitimasi. Dari legitimasi tersebut maka didapatkan pengakuan kewenangan dan kebijakan yang membentuk karakteristik internal organisasi sehingga sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan.

Proses perubahan organisasi dalam menyesuaikan diri memiliki tiga tahapan. Menurut identifikasi DiMaggio dan Powell (2000), tiga proses organisasi dalam menyesuaikan diri yaitu *coercive isomorphism, mimetic isomorphism,* dan *normative isomorphism*. *Coercive* merupakan penyesuaian organisasi melalui proses pemaksaan berupa tekanan yang berasal dari organisasi lain dengan pengaruh yang lebih kuat. *Mimetic* yaitu keadaan organisasi dalam meniru organisasi lain yang telah sukses pada suatu atau beberapa bidang tertentu, alasan peniruan tersebut

didorong keinginan agar organisasi lebih efisien. *Normative* atau sering disebut dengan profesionalisasi, menerima tekanan normatif yang timbul pada bidang tertentu.

Pada pemerintah daerah, perubahan internal organisasi yang dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan keinginan *stakeholder*. Selain itu, penyampaian informasi secara lengkap mengenai pertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah penting untuk menjaga kepercayaan utamanya masyarakat yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Inti dari teori institusional adalah tekanan dari lingkungan organisasi. Berkaitan dengan variabel umur daerah, semakin lama umur administratif maka pemerintah daerah semakin berpengalaman berkaitan dengan sistem yang digunakan dalam instansi pemerintah. Pengalaman yang didapatkan juga akibat dari tekanan normatif baik internal maupun eksternal. Tekanan normatif didapatkan juga dalam variabel spesialisasi pekerjaan dengan proksi pendidikan kepala daerah. Latar belakang pendidikan kepala daerah berpengaruh pada penyajian laporan keuangan sehingga mempermudah penerapan standar akuntansi pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, variabel jumlah penduduk menjadi suatu tekanan *coercive* bagi pemerintah daerah karena adanya tuntutan layanan umum serta tuntutan dalam pengungkapan laporan keuangan. *Intergovernmental revenue* dan temuan audit juga merupakan tekanan *coercive* yang sama-sama memiliki tanggung jawab kepada

stakeholder atas aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan seperti, penggunaan dana perimbangan oleh pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban aktivitas agar tidak terjadi tindakan yang memanipulasi.

2.4 *Intergovernmental Revenue*

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah memiliki definisi dan tempat masing-masing. Otonomi daerah memiliki kecenderungan pada aspek politik atau kekuasaan, sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada aspek administratif. Namun ada persamaan antara kedua istilah tersebut jika dilihat dalam konteks *sharing of power* karena pada kenyataannya kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan (Yudoyono, 2001 dalam Hilmi dan Martani, 2012).

Intergovernmental Revenue merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dan salah satu pendapatan yang didapat dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai keperluan pembiayaan dan dukungan dana untuk kegiatan pemerintah daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Definisi lain terkait *intergovernmental revenue* adalah dana transfer dengan nominal tertentu berasal dari pusat yang sengaja dianggarkan untuk membiayai program-program daerah (Sumarjo, 2010 dalam Simbolon dan Kurniawan, 2018). Kegiatan transfer dana tersebut lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional yang diperuntukkan kepada Daerah berdasarkan porsi yang telah ditetapkan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2) Dana AlokasI Umum

Dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional yang diperuntukkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional yang diperuntukkan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.5 Temuan Audit

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah entitas yang menilai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebagai auditor independen. Temuan audit diklasifikasikan menjadi suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan baik yang tertulis dan tidak tertulis, seperti pengendalian internal dan peraturan undang-undang yang berlaku. Temuan

audit berbentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku mengakibatkan potensi kerugian daerah. Kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah menjadi salah satu temuan audit yang perlu diungkapkan dari hasil audit yang dilakukan BPK. Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang sekarang telah menerapkan desentralisasi berdasar asas otonom daerah memiliki tantangan tersendiri khususnya pada luasnya kewenangan yang dimiliki daerah serta semakin besar dana yang perlu dikelola dapat mengakibatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan keuangan sehingga mengisyaratkan tingginya kelemahan SPI di dalam pemerintah daerah (Masdiantini dan Erawati, 2016).

Menurut ISO 9000, hasil penilaian dari bukti-bukti audit yang telah dihimpun menjadi satu terhadap kriteria audit disebut temuan audit. Auditor sebagai pihak yang memeriksa LKPD akan memberikan evaluasi untuk perbaikan terhadap temuan audit di akhir pemeriksaan. Hasil evaluasi yang diberikan kemudian dapat dikomunikasikan dengan tujuan sebagai bahan perbaikan dan koreksi atas temuan audit. Temuan audit memiliki ragam bentuk dan ukuran yang menggambarkan suatu situasi tertentu, yaitu:

1) Tidak melaksanakan kewajiban aktivitas, seperti aktivitas pengiriman yang belum dilakukan penagihan.
2) Penyimpangan aktivitas, seperti mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan untuk kepentingan pribadi.

3) Aktivitas-aktivitas yang memanipulasi, seperti penggantian tarif pada pembayaran barang dan perlengkapan.

4) Sistem yang tidak memuaskan, seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah dan signifikansinya.

5) Eksposur-eksposur risiko yang harus dipertimbangkan.

2.6 Umur Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai instansi di daerah terbentuk secara legal oleh undang-undang. Dari pembentukan tersebut dipastikan pemerintah daerah memiliki umur administratif. Umur administratif atau umur pemerintah daerah bermakna seberapa lama pemerintahan tersebut telah beroperasi sejak tahun dibentuknya (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Umur pemerintah daerah menunjukkan pengalaman yang dialami oleh pemerintah semakin banyak sehingga akan berpengaruh pada kemampuan dalam pencatatan dan administrasi serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki umur administratif relatif lebih muda atau baru (Hammami, 2009 dalam Syafitri, 2013). Dengan kata lain, pengaruh pemerintah daerah dalam mengungkapkan laporan keuangan semakin tinggi akibat evaluasi dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran sebelumnya.

2.7 Spesialisasi Pekerjaan

Pengukuran spesialisasi pekerjaan dapat dinilai dari tingkat pendidikan formal dengan banyak klasifikasi pekerjaan (Noviawati, 2021).

Kepada daerah selaku penanggung jawab dari seluruh aktivitas daerah, dalam hal ini pengelolaan keuangan, harus dapat menyajikan laporan keuangan dari pemerintah daerah yang telah memenuhi standar dari akuntansi pemerintahan. Latar belakang pendidikan kepala daerah di bidang ekonomi atau lebih spesifik di bidang akuntansi akan mempermudah pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah sehingga para pengguna laporan keuangan dan *stakeholder* mendapatkan informasi tentang laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

2.8 Jumlah Penduduk

Penduduk dalam laman online Badan Pusat Statistik (BPS) diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis dalam kurun waktu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan namun memiliki tujuan untuk segera menetap. Fungsi layanan dasar umum pemerintah daerah memiliki suatu komponen yaitu jumlah penduduk dalam menentukan kebutuhan pendanaan. Tingkat kebutuhan layanan umum dapat dilihat melalui pertimbangan dari jumlah penduduk di suatu daerah (Zaelani dan Martani, 2011). Jumlah penduduk berbanding lurus dengan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, semakin besar kompleksitas pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan umum. Selain itu, faktor lain yang perlu ditingkatkan adalah tuntutan untuk menjelaskan lebih baik dalam

pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk abdi pemerintah daerah kepada masyarakat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini mengambil referensi dari beberapa penelitian sebelumnya dengan variabel-variabel yang berkaitan untuk kemudian diuji. Variabel-variabel yang akan diuji pada penelitian ini yaitu variabel *Intergovernmental Revenue* (X_1), Temuan Audit (X_2), Umur Pemerintah Daerah (X_3), Spesialisasi Pekerjaan (X_4), dan Jumlah Penduduk (X_5) terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Simbolon dan Kurniawan (2018)	**Variabel Dependen:** Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan **Variabel Independen:** Ukuran Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif, Kekayaan Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Umur Administratif, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Rasio	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Sedangkan variabel independen lain tidak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

		Kemandirian Keuangan Daerah	
2	Dermawan (2017)	**Variabel Dependen:** Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan **Variabel Independen:** Dana Perimbangan, Ukuran Legislatif, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan	Ukuran legislatif, diferensiasi fungsional, dan spesialisasi pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
3	Pandansari (2016)	**Variabel Dependen:** Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah **Variabel Independen:** Tingkat Ketergantungan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), Kompleksitas Pemerintah (jumlah penduduk miskin) **Variabel Kontrol:** Ukuran Pemerintah Daerah (Aset)	Dana alokasi umum dan dana bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dana alokasi khusus dan jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Variabel kontrol total aset juga tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.
4	Priharjanto dan Wardani (2016)	**Variabel Dependen:** Tingkat Pengungkapan LKPD **Variabel Independen:** Temuan Audit, Tingkat Penyimpangan Audit, Opini Audit, Kekayaan Daerah,	Opini audit dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan temuan audit, tingkat penyimpangan audit, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, ukuran

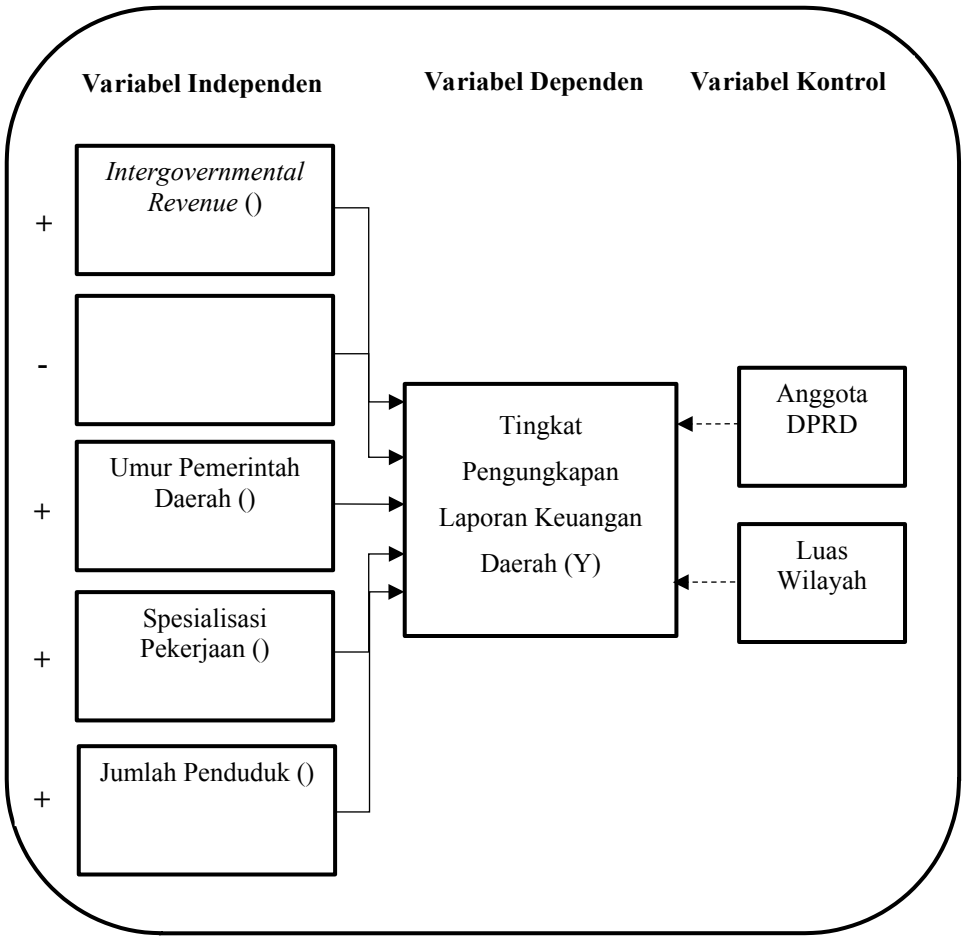
		Tingkat Ketergantungan, Ukuran Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD	daerah, dan jumlah SKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
5	Khasanah dan Rahardjo (2014)	**Variabel Dependen:** Tingkat Pengungkapan LKPD **Variabel Independen:** Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Total Aset, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD, Ukuran Legislatif, Temuan Audit	Variabel yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu total aset dan jumlah SKPD. Variabel kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, umur pemerintah, ukuran legislatif, dan temuan audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
6	Setyaningrum dan Syafitri (2012)	**Variabel Dependen:** Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD **Variabel Independen:** Ukuran Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif, Umur Administratif, Kekayaan Pemerintah Daerah, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*	Ukuran legislatif, umur administratif, dan kekayaan pemda merupakan variabel dengan pengaruh positif terhadap variabel dependen. Variabel *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.
7	Hilmi dan Martani (2012)	**Variabel Dependen:** Tingkat Pengungkapan LKPD **Variabel Independen:** Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemda, Aset	Kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan tingkat ketergantungan, aset

		Pemerintah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Temuan Audit, Tingkat Penyimpangan Audit	pemerintah, jumlah SKPD, temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
8	Lesmana (2010)	**Variabel Dependen:** Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD **Variabel Independen:** Ukuran Pemda, Kewajiban, Pendapatan Transfer, Umur Pemda, Jumlah SKPD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Umur pemda dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Variabel lain seperti ukuran pemda, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah SKPD tidak berpengaruh secara signifikan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

2.10 Kerangka Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yaitu pengaruh dari *intergovernmental revenue* (X_1), temuan audit (X_2), umur pemerintah daerah (X_3), spesialisasi pekerjaan (X_4), dan jumlah penduduk (X_5) terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol jumlah anggota DPRD dan luas wilayah. Penambahan variabel kontrol dilakukan dengan tujuan untuk menghindari perhitungan bias yang mungkin bisa terjadi akibat faktor lain. Gambaran mengenai kerangka konsep dan hubungan antar variabel dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Intergovernmental Revenue merupakan dana transfer atau pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Dana transfer yang telah diterima oleh pemerintah daerah akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas dana transfer yang telah digunakan untuk operasional daerah dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori *stakeholder* di mana pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi mengenai laporan keuangan atas pemakaian dana transfer yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan menyajikan informasi pengungkapan laporan keuangan kepada para *stakeholder*. Kemudian dalam teori institusional sesuai dengan tekanan *coercive* yang berhubungan dengan tekanan dari luar organisasi atau *stakeholder* agar pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap penggunaan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan atau *intergovernmental revenue* masih sangat tinggi di Indonesia. Dalam praktik desentralisasi fiskal, pemerintah pusat harus lebih efektif dalam melakukan pengawasan sehingga tercipta kondisi di mana pemerintah daerah dapat menyajikan LKPD secara transparan dan akuntabel. Semakin besar *intergovernmental revenue* dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan mendorong peningkatan pengungkapan LKPD. Penelitian Suhardjanto *et al* (2010) menemukan adanya pengaruh positif *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan

keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

2.11.2 Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit menurut ISO 9000 adalah hasil dari penilaian bukti-bukti audit yang telah dihimpun menjadi satu terhadap kriteria audit. Salah satu bukti audit yang dikumpulkan mengenai kelemahan dari sistem pengendalian internal. SPI berperan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah berusaha untuk meminimalisir kelemahan dari pengendalian internal sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan kewenangan dan kebijakan yang membentuk internal organisasi sehingga sesuai dengan keinginan *stakeholder*.

Penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) menemukan bahwa temuan audit tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Martani dan Liestiani (2012) menemukan temuan audit berhubungan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit yang telah dikumpulkan oleh BPK kemudian dikomunikasikan kepada

pemerintah daerah agar dilakukan peningkatan kualitas pengungkapan. Tujuannya untuk transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholder*. Semakin sedikit temuan audit maka semakin baik pengungkapan dari laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

2.11.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lama pemerintah daerah ada atau beroperasi sering diartikan sebagai umur administratif atau umur pemerintah daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Pembentukan pemerintah daerah secara resmi ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pemerintah daerah dengan umur daerah yang lebih lama cenderung memiliki pengalaman pada bidang administratif serta kemampuan lebih baik dalam penyajian laporan keuangan. Pengalaman yang diperoleh akibat dari evaluasi atas perbaikan laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor. Auditor yang dimaksud adalah BPK sehingga penyajian laporan keuangan lebih baik daripada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan dengan teori institusional, perubahan internal organisasi akibat tekanan normatif berpengaruh pada kinerja dari

sistem yang digunakan dalam instansi pemerintah. Semakin lama umur pemerintah daerah, tekanan normatif yang dialami pemerintah daerah semakin banyak sehingga terjadi profesionalisasi dalam penyampaian informasi serta laporan pertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan diharapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Profesionalisasi mengacu pada peningkatan kemampuan instansi pemerintah daerah dalam pengungkapan laporan keuangan.

Dari analisis di atas, pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama memiliki potensi lebih besar dalam hal menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan baik dibandingkan pemerintah daerah dengan umur administratif cenderung lebih muda. Salah satu variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) yaitu umur pemerintah daerah menemukan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib LKPD. Dengan kata lain, semakin tua umur pemerintah daerah maka pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan semakin tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

2.11.4 Pengaruh Spesialisasi Pekerjaan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Spesialisasi pekerjaan merupakan distribusi pekerjaan pada unit-unit pekerjaan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Spesialisasi pekerjaan menghasilkan produktivitas pada aktivitas yang bersifat administratif sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dalam pelaksanaannya. Pengukuran spesialisasi pekerjaan dapat dinilai dari tingkat pendidikan formal dengan banyak klasifikasi pekerjaan (Noviawati, 2021). Pada penelitian ini spesialisasi pekerjaan terutama dalam hal pengungkapan laporan keuangan didukung dengan latar belakang pendidikan kepala daerah di bidang ekonomi atau akuntansi. Kepala daerah dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau akuntansi memiliki peluang lebih besar pada penerapan standar akuntansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan daerah tersebut. Akibatnya para pengguna laporan keuangan dan *stakeholder* mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Kaitan variabel spesialisasi pekerjaan pada latar belakang pendidikan kepala daerah dengan teori institusional adalah tekanan normatif karena berhubungan dengan pendidikan dari kepala daerah. Pendidikan di bidang akuntansi berhubungan dengan pemahaman dan penerapan standar akuntansi pada laporan keuangan daerah agar dapat menyajikan informasi yang diperlukan

oleh *stakeholder* dan para pengguna laporan keuangan. Kemampuan dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh pada profesionalisasi dalam menyajikan informasi laporan keuangan agar terjadi peningkatan kualifikasi serta kemampuan pengungkapan dalam laporan keuangan sehingga kepatuhan dalam mengungkapkan laporan keuangan turut meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2017) menyatakan bahwa spesialisasi pekerjaan menunjukkan signifikansi positif yang artinya berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi berpengaruh pada pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, kepala daerah diharapkan mampu menghasilkan pengungkapan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sehingga tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah lebih baik dan terjadi profesionalisasi dalam penyampaian informasi serta laporan pertanggungjawaban hasil dari pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

2.11.5 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi salah satu komponen awal untuk menentukan kebutuhan pendanaan sebagai pelaksanaan fungsi layanan dasar umum. Jumlah penduduk merupakan faktor yang menggambarkan kebutuhan dalam penyediaan layanan publik. Semakin besar jumlah penduduk berdampak pada kompleksitas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum. Martini dan Zaelani (2011) juga menyampaikan hal serupa pada penelitiannya bahwa jumlah penduduk menjadi faktor untuk mempertimbangkan tingkat kebutuhan layanan umum.

Variabel jumlah penduduk memiliki kaitan dengan teori institusional akibat dari tekanan *coercive* yang timbul dari organisasi lain. Organisasi lain atau dalam hal ini masyarakat, memberikan tekanan dalam bentuk tuntutan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Wujud dari layanan umum salah satunya pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Hilmi dan Martani (2012) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Priharjanto dan Wardani (2016) dalam hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada dorongan pemerintah untuk lebih baik dalam pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi diartikan sebagai generalisasi dari kelompok atau sekumpulan subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik yang mempunyai kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se Pulau Jawa. Alasan pengambilan populasi Pemerintah Daerah se Pulau Jawa karena penelitian sebelumnya mengambil populasi seluruh Provinsi di Indonesia dengan metode *purposive sampling* atau pengambilan sampel dengan beberapa syarat sehingga penelitian ini mengambil populasi Pemerintah Daerah se Pulau Jawa dengan metode *random sampling* agar lebih sederhana dan fokus pada cakupan penelitian.

3.1.2 Sampel

Menurut Hermawan dan Amirullah (2016), sampel merupakan elemen yang diambil dari populasi dan dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Sampel tersebut dipelajari sehingga mampu menarik kesimpulan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *random sampling*. *Random sampling* merupakan teknik mengambil sampel dari suatu populasi tanpa ada

kriteria khusus dan setiap bagian dari populasi memiliki kemungkinan untuk menjadi sampel. Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se Pulau Jawa tahun anggaran 2018. Pada laman *online* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (bpk.go.id), laporan keuangan periode tahun 2018 telah dipublikasikan secara lengkap dan telah diaudit. Latar belakang pengambilan sampel laporan keuangan periode tahun 2018 se Pulau Jawa adalah pada penelitian lain dengan tahun anggaran sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan dan pada penelitian ini berusaha menguji kembali apakah tingkat pengungkapan laporan keuangan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menggunakan data yang telah disediakan di instansi atau lembaga-lembaga milik pemerintah atau swasta (Martono, 2010). Data sekunder yang digunakan merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari laman online Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (bpk.go.id), Badan Pusat Statistik (bps.go.id) dan data non keuangan dari masing-masing laman online Pemerintah Daerah. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se Pulau Jawa tahun 2018**.**

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Definisi dari tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah perbandingan antara pengungkapan yang telah diungkapkan pada LKPD terhadap pengungkapan yang seharusnya disajikan untuk diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pengukuran tingkat pengungkapan pada penelitian ini menggunakan sistem *scoring*. Mekanisme dari sistem *scoring* dengan memberikan skor pada daftar *checklist* pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Pemberian skor pengungkapan dilakukan jika dalam pelaporan mengungkapkan butir yang terdapat pada daftar maka diberi nilai satu dan jika tidak mengungkapkan maka diberi nilai nol. Butir-butir yang perlu diungkapkan tertuang dalam PSAP no. 05 sampai dengan PSAP no. 09.

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental Revenue merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dan salah satu pendapatan yang didapat dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai keperluan pembiayaan dan dukungan dana untuk kegiatan pemerintah daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Kegiatan

transfer dana tersebut lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Dana perimbangan dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penghitungan *intergovernmental revenue* dengan membagi total dana perimbangan yang diberikan dari pemerintah pusat dengan total pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

3.3.2.2 Temuan Audit

Temuan audit diklasifikasikan menjadi suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan baik yang tertulis dan tidak tertulis, seperti pengendalian internal dan peraturan undang-undang yang berlaku. Temuan audit berbentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku mengakibatkan potensi kerugian daerah. Kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah menjadi salah satu temuan audit yang perlu diungkapkan dari hasil audit yang dilakukan BPK. Temuan audit dihitung berdasarkan jumlah temuan yang telah diperiksa BPK.

3.3.2.3 Umur Pemerintah Daerah

Umur administratif atau umur pemerintah daerah bermakna seberapa lama pemerintah tersebut telah beroperasi sejak tahun dibentuknya (Mandasari, 2009). Umur pemerintah daerah menunjukkan pengalaman yang dialami oleh pemerintah semakin banyak sehingga akan berpengaruh pada kemampuan dalam

pencatatan dan administrasi serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki umur administratif relative lebih muda atau baru. Pengukuran yang dilakukan untuk menghitung umur pemerintah daerah dengan menghitung dari tahun lahir dari daerah tersebut.

3.3.2.4 Spesialisasi Pekerjaan

Spesialisasi pekerjaan dalam penelitian ini menggunakan proksi pendidikan kepala daerah. Pengukuran spesialisasi pekerjaan dapat dinilai dari tingkat pendidikan formal dengan banyak klasifikasi pekerjaan (Noviawati, 2021). Kepala daerah dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau akuntansi memiliki peluang lebih besar pada penerapan standar akuntansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan daerah sehingga para pengguna laporan keuangan dan *stakeholder* mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Pengukuran variabel spesialisasi pekerjaan dihitung jika kepala daerah atau wakilnya memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi maka bernilai 1. Apabila tidak memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi maka bernilai 0.

3.3.2.5 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan faktor yang menggambarkan kebutuhan dalam penyediaan layanan publik. Fungsi layanan dasar

umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan satu komponen penting yaitu jumlah penduduk juga menentukan kebutuhan pendanaan suatu daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jumlah penduduk yang semakin banyak akan berpengaruh pada kompleksitas pemerintah dalam memberikan pelayanan terutama pelayanan pelaporan keuangan yang perlu diungkapkan kepada masyarakat sehingga pengungkapan laporan keuangan harus senantiasa ditingkatkan. Pengukuran jumlah penduduk dilakukan dengan mengambil data pada Badan Pusat Statistik.

3.3.3 Variabel Kontrol

3.3.3.1 Luas Wilayah

Wilayah merupakan kawasan dengan berbagai unsur yang terikat di dalamnya termasuk batas dan memiliki sistem yang ditentukan oleh aspek administratif dan aspek fungsional (Ardhini, 2011 dalam Widanti, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah didefinisikan sebagai sebuah variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Pemerintah daerah dengan luas wilayah yang semakin besar memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sarana prasarana yang lebih baik demi terciptanya pelayanan publik yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan luas wilayah adalah adanya

komunikasi dan koordinasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dengan wilayah lebih luas akan menghadapi komunikasi dan koordinasi yang lebih kompleks dibanding pemerintah daerah dengan wilayah yang lebih sempit sehingga berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan. Pengukuran luas wilayah pemerintah daerah berdasarkan data yang telah ada pada laman *online* pemerintah daerah.

3.3.3.2 Jumlah Anggota DPRD

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah terkait pengawasan keuangan daerah (Yulianingtyas, 2010). Pengawasan dari DPRD dilakukan demi menjamin keselarasan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Selain itu, DPRD mengawasi aktivitas dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran agar dipergunakan dengan baik. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD mengontrol jalannya pemerintahan, pengawasan serta laporan informasi mengenai keuangan pemerintah daerah sehingga tercipta lingkungan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut, jumlah anggota DPRD berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Semakin besar jumlah anggota DPRD diharapkan berpengaruh pada kinerja

pemerintah daerah agar lebih bertanggung jawab dalam pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pengukuran jumlah anggota DPRD berdasarkan data pada laman *online* pemerintah daerah.

3.4 Model dan Alat Analisis Penelitian

Model yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian menggunakan model persamaan regresi berganda dan uji t dengan penggunaan alat bantu statistik SPSS. Model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan:

Y = Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

α = Konstanta,

$\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien regresi variabel dependen,

X_1 = *Intergovernmental Revenue,*

X_2 = Temuan Audit,

X_3 = Umur Pemerintah Daerah,

X_4 = Spesialisasi Pekerjaan,

X_5 = Jumlah Penduduk,

X_6 = Jumlah Anggota DPRD,

X_7 = Luas Wilayah,

e = Koefisien *error*.

3.5 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi memberikan gambaran data yang digunakan pada penelitian (Majid dan Ghozali, 2015). Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai *intergovernmental revenue*, temuan audit, umur pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, dan jumlah penduduk terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.6 Analisis Regresi Berganda

Pemilihan model regresi berganda digunakan karena pada penelitian ini terdiri dari variabel dependen berjumlah satu dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2016). Pengujian menggunakan uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum melanjutkan analisis regresi berganda untuk memastikan data yang digunakan dalam penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penafsiran koefisien regresinya efisien (Yulianingtyas, 2010). Beberapa pengujian pada uji asumsi klasik sebagai berikut:

3.6.1 Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang dimiliki terdistribusi dengan normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (Widhiarso, 2017). Alat uji pada uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan parameter apabila nilai

signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan mengetahui apakah model regresi yang ditemukan ada korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas melalui nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang dipakai sebesar 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Apabila nilai dari VIF kurang atau di bawah 10 artinya di antara variabel bebas tidak ada indikasi terjadi multikolinearitas.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Varian yang berbeda itu disebut heteroskedastisitas. Metode *Glejser* digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas atau tidak dengan melihat apakah nilai signifikansi > 0,05. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Nilai t

Siregar (2014) memaparkan bahwa T-*test* digunakan dalam penelitian untuk mengetahui dugaan atas hipotesis yang dirumuskan yaitu pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Cara pengujian dari uji t ini dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Pada penelitian ini, t-*test* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel independen dalam menerangkan variabel pengungkapan laporan keuangan daerah.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh umur pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh spesialisasi pekerjaan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengaruh jumlah penduduk terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah se Pulau Jawa. Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi sehingga mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Data yang disajikan merupakan data yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Pulau Jawa. Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah akan dihitung berdasarkan jumlah pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan poin-poin pengungkapan pada PSAP nomor 5 sampai PSAP nomor 9.

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sampel laporan keuangan pemerintah daerah se Pulau Jawa tahun 2018 sebanyak 90 laporan keuangan. Total laporan keuangan pemerintah daerah se Pulau jawa berjumlah 114 laporan keuangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah minimal sampel pada penelitian ini menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{114}{1 + 114(0{,}1)^2}$$

n = 53,27 = 53 sampel

Keterangan:

n = Jumlah minimal sampel yang dibutuhkan

N = Jumlah seluruh populasi

e = *Error bound* yang ditoleransi/persentase kesalahan yang ditoleransi (10%)

4.2 Analisis Deskriptif

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *intergovernmental revenue*, temuan audit, umur pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, dan jumlah penduduk dengan jumlah anggota DPRD dan luas wilayah sebagai variabel kontrol serta variabel dependen tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil statistik deskriptif dari variabel penelitian ini disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Hasil Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	n	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Intergovernmental Revenue	90	10.82	13.25	12.1560	.23965
Temuan Audit	90	.48	1.20	.7785	.15992
Umur Pemerintah Daerah	90	1.00	1.86	1.7730	.16757
Spesialisasi Pekerjaan	90	0	1	.36	.481
Jumlah Penduduk	90	5.11	7.02	6.0454	.30991
Jumlah Anggota DPRD	90	1.40	2.03	1.6632	.08270
Luas Wilayah	90	1.22	3.76	2.9043	.50982
Tingkat Pengungkapan LKPD	90	1.08	1.40	1.2778	.05683

Tabel 4.1 Hasil olah data SPSS, 2022

Tabel 4.1 memaparkan hasil analisis statistik deskriptif dengan informasi sebagai berikut:

a. *Intergovernmental Revenue*

   Dalam uji ini, *intergovernmental revenue* diubah menjadi bentuk logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel *intergovernmental revenue* memiliki nilai minimum 10,82 dan nilai maksimum 13,25 serta nilai rata-rata sebesar 12,1560 dan standar deviasi sebesar 0,23965.

b. Temuan Audit

   Dalam uji ini, temuan audit diubah menjadi bentuk logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel temuan audit memiliki nilai minimum 0,48 dan nilai maksimum 1,20 serta nilai rata-rata sebesar 0,7785 dan standar deviasi sebesar 0,15992.

c. Umur Pemerintah Daerah

Dalam uji ini, umur pemerintah daerah diubah menjadi bentuk logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel umur pemerintah daerah memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 1,86 serta nilai rata-rata sebesar 1,7730 dan standar deviasi sebesar 0,16757.

d. Spesialisasi Pekerjaan

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel spesialisasi pekerjaan memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1 serta nilai rata-rata sebesar 0,36 dan standar deviasi sebesar 0,481.

e. Jumlah Penduduk

Dalam uji ini, jumlah penduduk diubah menjadi bentuk logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel jumlah penduduk memiliki nilai minimum 5,11 dan nilai maksimum 7,02 serta nilai rata-rata sebesar 6,0454 dan standar deviasi sebesar 0,30991.

f. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam uji ini, tingkat pengungkapan LKPD diubah menjadi bentuk logaritma. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel tingkat pengungkapan LKPD memiliki nilai minimum 1,08 dan nilai maksimum 1,40 serta nilai rata-rata sebesar 1,2778 dan standar deviasi sebesar 0,05683.

4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan data yang digunakan dalam penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penafsiran koefisien regresinya efisien sehingga diperoleh data yang terdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinearitas maupun heteroskedastisitas pada data penelitian.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang dianalisis terdistribusi normal atau tidak. Metode dalam uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov*. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan parameter apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal. Hasil dari uji normalitas pada penelitian ini disajikan pada tabel Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
n		90
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.32179003
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.066
Test Statistik		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Tabel 4. 2 Hasil olah data SPSS, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa *Asymp*. Sig. (2-*tailed*) sebesar 0,200 atau nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai yang

dihasilkan dari uji normalitas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah terdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Pengujian pada uji multikolinearitas memperhatikan pada besarnya nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Syarat tidak terjadinya multikolinearitas jika *tolerance value* > 0,10 dan nilai dari VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Intergovernmental Revenue	.329	3.036	Tidak terjadi Multikolinearitas
Temuan Audit	.701	1.427	Tidak terjadi Multikolinearitas
Umur Pemerintah Daerah	.659	1.517	Tidak terjadi Multikolinearitas
Spesialisasi Pekerjaan	.948	1.055	Tidak terjadi Multikolinearitas
Jumlah Penduduk	.227	4.405	Tidak terjadi Multikolinearitas
Jumlah Anggota DPRD	.289	3.456	Tidak terjadi Multikolinearitas
Luas Wilayah	.487	2.055	Tidak terjadi Multikolinearitas

Tabel 4.3 Hasil olah data SPSS, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai *tolerance* menunjukkan nilai > 0,1 dengan hasil nilai *Tolerance* dari *Intergovernmental Revenue* sebesar 0,329; nilai *Tolerance* dari Temuan Audit sebesar 0,701; nilai *Tolerance* dari Umur Pemerintah Daerah sebesar 0,659; nilai *Tolerance* dari Spesialisasi Pekerjaan sebesar 0,948; nilai *Tolerance* dari Jumlah Penduduk sebesar 0,227; nilai *Tolerance* dari Jumlah Anggota DPRD sebesar 0,289; nilai *Tolerance* dari Luas Wilayah sebesar 0,487. Nilai VIF pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari VIF < 10 dengan nilai VIF dari *Intergovernmental Revenue* sebesar 3,036; nilai VIF dari Temuan Audit sebesar 1,427; nilai VIF dari Umur Pemerintah Daerah sebesar 1,517; nilai VIF dari Spesialisasi Pekerjaan sebesar 1,055; nilai VIF dari Jumlah Penduduk sebesar 4,405; nilai VIF dari Jumlah Anggota DPRD sebesar 3,456; nilai VIF dari Luas Wilayah sebesar 2,055. Dari penjelasan nilai *Tolerance* dan nilai VIF tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji pada sebuah model regresi apakah terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila metode *glejser* pada uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala

heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi menunjukkan < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan metode *glejser* pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Sig.
Intergovernmental Revenue (X1)	0.465
Temuan Audit (X2)	0.144
Umur Pemerintah Daerah (X3)	0.271
Spesialisasi Pekerjaan (X4)	0.123
Jumlah Penduduk (X5)	0.417
Jumlah Anggota DPRD (X6)	0.090
Luas Wilayah (X7)	0.981

Tabel 4. 4 Hasil data SPSS, 2022

Syarat tidak terjadi heteroskedastisitas pada metode *glejser* adalah tingkat signifikansi > 0,05. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari *Intergovernmental Revenue* sebesar 0,465; nilai signifikansi dari Temuan Audit sebesar 0,144; nilai signifikansi dari Umur Pemerintah Daerah sebesar 0,271; nilai signifikansi dari Spesialisasi Pekerjaan sebesar 0,123; nilai signifikansi dari Jumlah Penduduk sebesar 0,417; nilai signifikansi dari Jumlah Anggota DPRD sebesar 0,090; nilai signifikansi dari Luas Wilayah sebesar 0,981. Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas dengan metode *glejser* menunjukkan bahwa

nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue*, temuan audit, umur pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, jumlah penduduk, serta variabel kontrol jumlah anggota DPRD dan luas wilayah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-.032	.255	-.124	.901
Intergovernmental Revenue (X1)	-.010	.028	-.349	.728
Temuan Audit (X2)	.033	.028	1.182	.240
Umur Pemerintah Daerah (X3)	.027	.029	.953	.343
Spesialisasi Pekerjaan (X4)	.015	.008	1.812	.074**
Jumlah Penduduk (X5)	.062	.026	2.356	.021*
Jumlah Anggota DPRD	-.162	.087	-1.869	.065**

(X6)				
Luas Wilayah (X7)	.002	.011	.178	.859

**signifikan pada 0,05; ** signifikan pada 0,10*

Tabel 4. 5 Hasil data SPSS, 2022

Model persamaan berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Y = -0,032 – 0,010X1 + 0,033X2 + 0,027X3 + 0,015X4 + 0,062X5 – 0,162X6 + 0,002X7 + e

4.4.1 Uji T

Perhitungan uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh sebuah variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil dari uji t dilihat dari nilai signifikansi dan nilai t hitung yang akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika nilai signifikansi dari variabel independen < 0,05 atau < 0,1 dan t hitung > t tabel maka hipotesis penelitian menunjukkan pengaruh signifikan yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika terjadi keadaan sebaliknya yaitu nilai signifikansi > 0,05 atau > 0,1 dan t hitung < t tabel maka hipotesis penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t tabel berdasarkan jumlah data penelitian adalah 1,989 atau (-1,989). Hasil dari uji t pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	T	Sig.
(Constant)	-.032	-.124	.901
Intergovernmental Revenue (X1)	-.010	-.349	.728
Temuan Audit (X2)	.033	1.182	.240
Umur Pemerintah Daerah (X3)	.027	.953	.343
Spesialisasi Pekerjaan (X4)	.015	1.812	.074**
Jumlah Penduduk (X5)	.062	2.356	.021*
Jumlah Anggota DPRD (X6)	-.162	-1.869	.065**
Luas Wilayah (X7)	.002	.178	.859

signifikan pada 0,05; **signifikan pada 0,10

Tabel 4. 6 Hasil data SPSS, 2022

Tabel 4.6 menunjukkan hasil dari uji t sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hipotesis-hipotesis penelitian.

a. *Intergovernmental Revenue*

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien -0,010, nilai t hitung -0,349, dan nilai signifikansi 0,728. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar -0,010 memiliki arti apabila *intergovernmental revenue* meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan akan menurun sebesar 0,010. Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung (-0,349) < t tabel

(-1,989) dan nilai signifikansi sebesar 0,728 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental Revenue* (X1) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

b. Temuan Audit

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien 0,033, nilai t hitung 1,182, dan nilai signifikansi 0,240. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar 0,033 memiliki arti apabila temuan audit meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,033. Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung (1,182) < t tabel (1,989) dan nilai signifikansi sebesar 0,240 sehingga dapat disimpulkan bahwa Temuan Audit (X2) tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

c. Umur Pemerintah Daerah

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien 0,027, nilai t hitung 0,953, dan nilai signifikansi 0,343. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar 0,027 memiliki arti apabila umur pemerintah daerah meningkat sebesar satu

satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,027. Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung (0,953) < t tabel (1,989) dan nilai signifikansi sebesar 0,343 sehingga dapat disimpulkan bahwa Umur Pemerintah Daerah (X3) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

d. Spesialisasi Pekerjaan

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien 0,015, nilai t hitung 1,812, dan nilai signifikansi 0,074. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar 0,015 memiliki arti apabila spesialisasi pekerjaan meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,015. Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung (1,812) > t tabel (1,663) dan nilai signifikansi sebesar 0,074 sehingga dapat disimpulkan bahwa Spesialisasi Pekerjaan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

e. Jumlah Penduduk

Hasil uji regresi berganda menghasilkan nilai koefisien 0,062, nilai t hitung 2,356, dan nilai signifikansi 0,021. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 atau < 0,1. Koefisien regresi sebesar 0,062 memiliki arti apabila jumlah penduduk meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan meningkat sebesar 0,062. Hasil dari tabel di atas menunjukkan t hitung (2,356) > t tabel (1,989) dan nilai signifikansi sebesar 0,021 sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

4.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Hasil dari uji regresi mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, yaitu : *Intergovernmental Revenue* (H1), Temuan Audit (H2), Umur Pemerintah Daerah (H3), Spesialisasi Pekerjaan (H4), Jumlah Penduduk (H5) menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima adalah Spesialisasi Pekerjaan (H4) dan Jumlah Penduduk (H5) sehingga Spesialisasi Pekerjaan dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pembahasan dari hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

4.5.1 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel *Intergovernmental Revenue* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,10 dan nilai signifikansi sebesar 0,728 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Intergovernmental Revenue merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai aktivitas dan kebutuhan pemerintah daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* atau dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga penyebab *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan dapat disebabkan masih ada sumber pendapatan daerah lain yang lebih dominan memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang dapat mendukung kebutuhan dan aktivitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah seperti

yang disebutkan sebelumnya berupa pajak daerah, dana retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya masih dapat memenuhi keperluan program atau kegiatan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan teori institusional pada proses *coercive* di mana organisasi dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah daerah mendapatkan tekanan dari pihak eksternal atau pemerintah pusat untuk diminta pertanggungjawaban dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pada laporan keuangan pemerintah daerah telah mencantumkan jumlah pengeluaran atas realisasi dana transfer namun dari hasil uji hipotesis tetap menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon dan Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dermawan (2017) juga menyatakan pada hasil penelitiannya bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.2 Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel Temuan Audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,033 dan nilai signifikansi sebesar 0,240 sehingga dapat disimpulkan bahwa Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Temuan audit berbentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan dapat mengakibatkan potensi kerugian daerah seperti kelemahan pada pengendalian internal dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit dalam laporan keuangan daerah yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan karena kurangnya pengendalian internal dari pemerintah daerah dan kepatuhan perangkat daerah di dalam organisasi daerah itu sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurang optimalnya fungsi manajemen pemerintah daerah dalam menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berkaitan dengan pengendalian internal. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi menjadi alasan lain temuan audit pada laporan keuangan semakin banyak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan teori *stakeholder*, pemerintah daerah harus memberikan manfaat kepada para *stakeholder* salah satunya masyarakat dengan tanggung jawab terhadap aktivitas

pemerintahan. Tanggung jawab yang dimaksud adalah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan dengan pengendalian internal yang baik sehingga aktivitas di dalam entitas pemerintah daerah dapat berjalan optimal. Selain itu dengan meningkatkan komunikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan kerugian pada pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini masih sejalan dengan penelitian Priharjanto dan Wardani (2016) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah karena kurangnya upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Rahardjo (2014) juga menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah akibat revisi yang diberikan oleh BPK hanya sebatas pemenuhan kewajiban yang dicantumkan pada laporan keuangan.

4.5.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel Umur Pemerintah Daerah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,027 dan nilai signifikansi sebesar 0,343 sehingga dapat

disimpulkan bahwa Umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Umur pemerintah daerah adalah seberapa lama pemerintah daerah tersebut beroperasi sejak terbentuk secara legal oleh undang-undang. Umur yang identik dengan sebuah pengalaman dapat menggambarkan bahwa semakin lama umur pemerintah daerah maka pengalaman dalam mengelola utamanya administrasi serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik. Namun hasil pada penelitian ini menunjukkan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan para pegawai yang bekerja dalam entitas pemerintah daerah hanya melakukan pekerjaan administratif secara berulang (repetitif) dan kurang meningkatkan kualitas dalam penyajian laporan keuangan, khususnya dalam hal pengungkapan pada laporan keuangan.

Berkaitan dengan teori institusional pada proses normatif bahwa semakin lama umur pemerintah daerah maka tekanan normatif yang dialami pemerintah daerah semakin banyak sehingga terjadi profesionalisasi dalam penyampaian informasi utamanya hasil laporan keuangan. Profesionalisasi yang merujuk

pada proses peningkatan kemampuan dalam pengungkapan laporan keuangan tidak menghasilkan hubungan yang signifikan sehingga umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil serupa disajikan pada penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang berbeda disajikan dalam penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menyimpulkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.4 Pengaruh Spesialisasi Pekerjaan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel Spesialisasi Pekerjaan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,074 sehingga dapat disimpulkan bahwa Spesialisasi Pekerjaan berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 4.7
Spesialisasi Pekerjaan

Latar Belakang Pendidikan	Tahun 2018	
	n	%
Ekonomi	32	36%
Bukan Ekonomi	58	64%

Tabel 4. 7 Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah

Pengukuran spesialisasi pekerjaan dapat dinilai dari tingkat pendidikan formal dengan banyak klasifikasi pekerjaan (Noviawati, 2021). Penilaian tingkat pendidikan formal pada penelitian ini menggunakan indikator latar belakang pendidikan kepala daerah di bidang ekonomi atau akuntansi. Latar belakang di bidang ekonomi atau akuntansi diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar dari akuntansi pemerintahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa spesialisasi pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan hasil latar belakang pendidikan kepala daerah yang bukan berasal dari bidang ekonomi lebih banyak dari kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi diharapkan dapat mengelola keuangan daerah secara lebih baik daripada kepala daerah tanpa latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Namun hasil data menunjukkan baik dari kepala daerah tanpa latar belakang pendidikan ekonomi maupun kepala daerah dengan latar belakang ekonomi tetap memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga spesialisasi pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan teori institusional pada proses normatif, kepala daerah menerima tekanan normatif sebagai bentuk tanggung jawab dalam memimpin daerah untuk memahami laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah baik yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi maupun yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa spesialisasi pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan Dermawan (2017) yang menyatakan bahwa spesialisasi pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Simbolon dan Kurniawan (2018) pada penelitiannya yang menyatakan bahwa spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.5 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel Jumlah Penduduk menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,062 dan nilai signifikansi sebesar 0,021 sehingga dapat disimpulkan bahwa

Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penduduk dalam laman online Badan Pusat Statistik (BPS) diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis dalam kurun waktu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan namun memiliki tujuan untuk segera menetap. Jumlah penduduk berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan layanan umum yang diberikan kepada masyarakat karena semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, semakin besar kompleksitas pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti ada dorongan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan umum dalam bentuk pertanggungjawaban untuk mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan teori institusional, pemerintah mendapatkan tekanan *coercive* yang timbul dari organisasi lain yaitu masyarakat dalam bentuk tuntutan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Fungsi layanan yang dimaksud adalah mengenai pengungkapan pada laporan keuangan di mana dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

Jika jumlah penduduk yang semakin besar menghendaki adanya pengungkapan laporan keuangan dari pemerintah daerah maka akan tercipta pengungkapan laporan keuangan yang semakin baik dari tahun ke tahun akibat dari tuntutan masyarakat.

Hasil penelitian ini selaras dengan Priharjanto dan Wardani (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan akibat dari banyaknya kebutuhan akan pelayanan publik sehingga terjadi peningkatan pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian lain serupa dari Hilmi dan Martani (2012) juga menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh *intergovernmental revenue*, temuan audit, umur pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti bahwa besaran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan karena pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah lain seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lain yang lebih mendukung aktivitas dan kebutuhan pemerintah daerah sehingga dana transfer dari pemerintah pusat hanya sebagai tambahan dana pendukung aktivitas dan kebutuhan pemerintah daerah.
2. Temuan audit tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti bahwa semakin sedikit temuan audit yang

ditemukan dalam laporan keuangan tidak memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan karena kurang optimalnya upaya pemerintah daerah untuk melakukan rekomendasi yang diberikan BPK dan revisi yang diberikan hanya sebatas pemenuhan kewajiban yang dicantumkan dalam laporan keuangan.

3. Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti bahwa pengalaman kinerja dari tahun ke tahun tidak memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan dan para pegawai pemerintah daerah yang bekerja hanya melakukan pekerjaan administratif secara berulang (repetitif) atau sebatas pemenuhan kewajiban serta kurang meningkatkan kualitas dalam penyajian laporan keuangan.
4. Spesialisasi pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti bahwa latar belakang pendidikan kepala daerah baik yang berasal dari ekonomi maupun bukan ekonomi tetap memiliki tanggung jawab utamanya dalam pengungkapan laporan keuangan sehingga kepala daerah harus memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan.

5. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti jumlah penduduk ikut berperan dalam mendorong pelayanan umum agar pemerintah daerah meningkatkan pengungkapan laporan keuangan sehingga jumlah penduduk memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pada penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan variabel independen lain, seperti jumlah satuan kerja perangkat daerah, ukuran legislatif, dan total aset.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi dan memperbanyak sampel agar mendapatkan representasi lebih baik dalam pengungkapan laporan keuangan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa mengenai pengungkapan laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban pemerintah daerah sehingga terjadi peningkatan pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan

pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta meningkatkan pelayanan umum dan komunikasi internal dalam entitas pemerintah daerah akibat dari faktor spesialisasi pekerjaan dan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah agar terjadi peningkatan pengungkapan laporan keuangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito, D. W. Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Ashworth, R., Boyne, G., & Delbridge, R. (2009). Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. Journal of public administration research and theory, 19(1), 165-187.

Belkaoui, A. R. (2006). Teori Akuntansi, edisi kelima. Salemba Empat: Jakarta.

Belumlama.com (2020, 30 April). Temuan Audit. Diakses pada 25 Maret 2021, dari https://www.belumlama.com/temuan-audit/#:~:text=Menurut%20ISO%209000%2C%20temuan%20audit,kriteria%20audit%20atau%20peluang%20perbaikan.

Bps.go.id (2021). Kependudukan. Diakses pada 26 Agustus 2021, dari https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html

Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Dermawan, D. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Ukuran Legislatif, Deferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan Terhadap Tingkap Pengungkapan Laporan Keuangan.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2000). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. In Economics meets sociology in strategic management. Emerald Group Publishing Limited.

Dosenpendidikan.co.id (2021, 17 Februari). Otonomi Daerah. Diakses pada 10 Maret 2021, dari https://www.dosenpendidikan.co.id/otonomi-daerah/

Dosenpendidikan.co.id (2021, 12 Maret). Stakeholder adalah. Diakses pada 22 Maret 2021, dari https://www.dosenpendidikan.co.id/stakeholder-adalah/

Freeman, R. E., & McVea, J. (2001). A stakeholder approach to strategic management. The Blackwell handbook of strategic management, 189-207.

Gischa, Serafica (2020, 6 Februari). Otonomi Daerah: Definisi, Asas, Tujuan, Hak dan Kewajibannya. Diakses pada 10 Maret 2021, dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/160000769/otonomi-daerah-definisi-asas-tujuan-hak-dan-kewajibannya?page=all#page2

Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23 (edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 96.

Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53-64.

Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 4(8).

Hartono, J. (2013). Metodologi penelitian bisnis. Yogyakarta: BPFE.

Hendriksen, E. S. (2002). Teori Akuntansi Jilid 1 Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.

Hermawan, S., & Amirullah, A. (2016). METODE PENELITIAN BISNIS Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif.

Hidayat, Anwar (2013, 23 Januari). Uji F dan Uji T. Diakses pada 4 April 2021, dari https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html.

Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV, 20.

Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Diponegoro journal of accounting, 3(2), 864-874.

Kristanto, S. B. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. Jurnal Akuntansi UKRIDA.

Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Majid, R. A., & Ghozali, I. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan di Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, 4(4), 381-391.

Mandasari, P. (2009). Practices of mandatory disclosure compliance in Indonesian local government. Universitas Sebelas Maret.

Martani, D., & Lestiani, A. (2012). Disclosure in local government financial statements: the case of Indonesia. Global review of Accounting and Finance, 3(1), 67-84.

Martani, D., & Zaelani, F. (2011). Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah studi kasus di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011, 1-27.

Martono, N. (2010). Analisis isi dan analisis data sekunder. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. E-Jurnal Akuntansi, 14(2), 1150-1182.

Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. American journal of political science, 739-777.

Murti, G. A., & Muafiqie, H. (2018). Institusionalisasi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Jombang. Journal of Public Power, 2(2), 67-78.

Nainggolan, A. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komposisi Dewan Komisaris terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di Bei. Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist, 1(1), 1-9.

Noviawati, F. (2021). Analisis Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).

Nugraha, Y. N. (2019, 20 Januari). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Diakses pada 28 Maret 2021, dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/

Pandansari, T. (2016). Tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintah, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(3), 463.

Patrick, P. A. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government (Doctoral dissertation, Pennsylvania State University).

Porosilmu.com (2015, November). Apa Bedanya Profesi, Profesional, Profesionalisme, Profesionalitas dan Profesionalisasi. Diakses pada 1 September 2021, dari https://www.porosilmu.com/2015/11/apa-bedanya-profesi-prefesional.html

Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Info Artha, 1, 97-110.

Riadi, Muchlisin (2020, 10 September). Pengungkapan atau Disclosure (Pengertian, Tujuan, Jenis, Tingkatan dan Metode). Diakses pada 20 Maret 2021, dari https://www.kajianpustaka.com/2020/09/pengungkapan-atau-disclosure.html.

Rokhlinasari, S. (2016). Teori-teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 7(1).

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. Jurnal akuntansi dan Keuangan, 2(2), 138-150.

Salmaa (2021, 1 Juli). Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar. Diakses pada 30 Desember 2021, dari https://penerbitdeepublish.com/purposive-sampling/.

Syamsuddin Haris; Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI); Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI). (2005). Desentralisasi & otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintah daerah / editor, Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154-170.

Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di seluruh provinsi Indonesia.

Siregar, S. (2014). Statistika Parametrik untuk penelitian kuantitatif: dilengkapi dengan perhitungan manual dan aplikasi versi 17.

Skripsi.id (2015, Maret). Teori Stakeholder. Diakses pada 22 Maret 2021, dari http://www.skripsi.id/2015/03/teori-stakeholder.html

Sugiyono, P. D. (2013). Metode penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta, CV.

Suhardjanto, D., & Rusmin, M. P., Brown, A. 2010. Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, 1-13.

Suliyanto, S. E., & MM, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif.

Suryatiningsih, E. (2005). Analisis Tingkat Spesialisasi Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Pada Pegawai Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Suwardjono. 2014. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.

Widanti, R. Y. (2019). Analisis Faktor Yang memengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.

Widhiarso.(2017). Uji Normalitas. Widhiarso.Staff.Ugm.Ac.Id. http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/Uji Normalitas.pdf.

Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia).

Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. Annual review of sociology, 13(1), 443-464.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 1243/DEK/10/Div.URT/VI/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Assalamu alaikum wr.wb.
Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama	: Faisal Akmal Sani
No. Mahasiswa	: 17312400
Tempat/Tanggal Lahir	: Magelang / 29 November 1998
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang	: Strata 1 (S1)
Alamat	: Demesan Girirejo Tempuran Kab. Magelang

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Intergovernmental Revenue, Temuan Audit, Umur Pemerintah Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"

Dosen Pembimbing : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2021
Dekan,

Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 933130101

LAMPIRAN 2

Tabel Daftar Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

CHECKLIST PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1	0
PSAP NO 05 TENTANG AKUNTANSI PERSEDIAAN		
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan		
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		
3. Kondisi persediaan		
PSAP NO 06 TENTANG AKUNTANSI INVESTASI		
4. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi		
5. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen		
6. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang		
7. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut		
8. Investasi yang dinilai dengan 1 ngan nilai wajar dan alasan penerapannya		
9. Perubahan pos investasi		
PSAP NO 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP		
10. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)		
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:		
11. Penambahan		
12. Pelepasan		
13. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada		
14. Mutasi aset tetap lainnya		

Informasi penyusutan, meliputi:		
15. Nilai penyusutan		
16. Metode penyusutan yang digunakan		
17. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan		
18. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode		
19. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap		
20. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap		
21. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi		
22. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap		
Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:		
23. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap		
24. Tanggal efektif penilaian kembali		
25. Jika ada, nama penilai independen		
26. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti		
27. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap		
PSAP NO 08 TENTANG AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		
28. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya		
29. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya		
30. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan		
31. Uang muka kerja yang diberikan		
32. Retensi		
PSAP NO 09 TENTANG AKUNTANSI KEWAJIBAN		
33. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman		
34. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya		

35. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku		
36. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo		
Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:		
37. Pengurangan pinjaman		
38. Modifikasi persyaratan utang		
39. Pengurangan tingkat bunga pinjaman		
40. Pengunduran jatuh tempo pinjaman		
41. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman		
42. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan		
43. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur		
Biaya pinjaman:		
44. Perlakuan biaya pinjaman		
45. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan		
46. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan		

LAMPIRAN 3

Intergovernmental Revenue

BANTEN	
Kab. Lebak	Rp 1,539,049,050,766.00
Kab. Pandeglang	Rp 2,016,640,078,447.00
Kab. Serang	Rp 1,546,651,981,229.00
Kab. Tangerang	Rp 1,758,969,673,001.00
Kota Cilegon	Rp 841,804,102,872.00
Kota Serang	Rp 735,561,644,568.00
Kota Tangerang	Rp 1,341,676,525,655.00
Kota Tangerang Selatan	Rp 889,139,727,314.00
DKI JAKARTA	
DKI Jakarta	Rp 17,855,177,072,924.00
JAWA BARAT	
Kab. Bandung	Rp 3,137,666,226,435.00
Kab. Bogor	Rp 2,818,814,498,138.00
Kab. Ciamis	Rp 1,627,548,414,865.00
Kab. Cianjur	Rp 2,246,193,466,963.00
Kab. Cirebon	Rp 2,070,427,928,565.00
Kab. Garut	Rp 2,625,652,140,243.00
Kab. Indramayu	Rp 1,988,742,976,961.00
Kab. Karawang	Rp 2,048,785,689,308.00
Kab. Kuningan	Rp 1,662,033,402,705.00
Kab. Majalengka	Rp 1,668,010,124,763.00
Kab. Subang	Rp 1,867,788,292,762.00
Kab. Sukabumi	Rp 1,964,152,558,370.00
Kab. Sumedang	Rp 1,638,676,633,162.00
Kab. Tasikmalaya	Rp 2,067,009,180,838.00
Kota Bandung	Rp 2,427,237,815,833.00
Kota Banjar	Rp 505,143,731,566.00
Kota Bekasi	Rp 1,653,956,944,914.00
Kota Cimahi	Rp 66,808,176,054.00
Kota Depok	Rp 1,158,659,583,597.00
JAWA TENGAH	
Kab. Banjarnegara	Rp 1,354,080,374,738.00
Kab. Banyumas	Rp 1,894,413,016,142.00
Kab. Boyolali	Rp 1,438,528,619,300.00
Kab. Brebes	Rp 1,753,057,931,104.00
Kab. Cilacap	Rp 1,874,260,346,332.00
Kab. Demak	Rp 1,205,186,810,394.00
Kab. Grobogan	Rp 1,794,017,726,760.00

Kab. Jepara	Rp 1,339,634,292,620.00
Kab. Karanganyar	Rp 1,325,732,297,703.00
Kab. Klaten	Rp 1,652,127,767,661.00
Kab. Kudus	Rp 1,281,771,374,568.00
Kab. Magelang	Rp 1,398,132,841,570.00
Kab. Pati	Rp 1,637,310,968,390.00
Kab. Pekalongan	Rp 1,288,217,218,488.00
Kab. Pemalang	Rp 1,542,908,673,569.00
Kab. Purbalingga	Rp 1,240,574,231,875.00
Kab. Purworejo	Rp 1,247,436,685,096.00
Kab. Rembang	Rp 902,171,379,111.00
Kab. Semarang	Rp 1,307,508,472,787.00
Kab. Sragen	Rp 1,405,508,762,647.00
Kab. Sukoharjo	Rp 1,219,811,099,454.00
Kab. Tegal	Rp 1,513,203,330,274.00
Kab. Temanggung	Rp 1,069,110,356,426.00
Kab. Wonogiri	Rp 1,532,139,685,475.00
Kab. Wonosobo	Rp 1,139,805,205,659.00
Kota Salatiga	Rp 561,012,927,696.00
Kota Surakarta	Rp 1,090,922,293,666.00
D.I. YOGYAKARTA	
Kab. Bantul	Rp 1,355,455,930,302.00
Kab. Gunung Kidul	Rp 1,264,791,667,120.00
Kab. Kulon Progo	Rp 973,566,098,525.00
Kab. Sleman	Rp 1,368,717,993,794.00
Kota Yogyakarta	Rp 867,706,455,745.00
JAWA TIMUR	
Kab. Bangkalan	Rp 1,344,825,042,010.00
Kab. Banyuwangi	Rp 1,960,992,382,687.00
Kab. Blitar	Rp 1,599,499,305,169.00
Kab. Bojonegoro	Rp 3,814,660,800,562.00
Kab. Bondowoso	Rp 1,336,039,553,661.00
Kab. Gresik	Rp 1,425,168,417,026.00
Kab. Jember	Rp 2,347,407,698,706.00
Kab. Jombang	Rp 1,559,258,761,514.00
Kab. Kediri	Rp 1,769,048,284,685.00
Kab. Lamongan	Rp 1,700,714,352,575.00
Kab. Magetan	Rp 1,280,133,487,395.00
Kab. Nganjuk	Rp 1,529,562,444,177.00
Kab. Ngawi	Rp 1,486,134,020,027.00
Kab. Pacitan	Rp 1,170,405,463,618.00
Kab. Pamekasan	Rp 1,252,406,756,553.00

Kab. Pasuruan	Rp 2,185,098,553,219.00
Kab. Ponorogo	Rp 1,552,016,044,423.00
Kab. Probolinggo	Rp 1,395,763,926,032.00
Kab. Sampang	Rp 1,212,116,500,870.00
Kab. Sidoarjo	Rp 1,793,474,341,790.00
Kab. Situbondo	Rp 1,227,769,851,587.00
Kab. Sumenep	Rp 1,601,302,418,621.00
Kab. Trenggalek	Rp 1,277,893,727,362.00
Kab. Tuban	Rp 1,493,217,733,407.00
Kab. Tulungagung	Rp 1,701,678,499,757.00
Kota Batu	Rp 649,243,671,787.00
Kota Blitar	Rp 626,534,717,922.00
Kota Malang	Rp 1,181,289,819,588.00
Kota Mojokerto	Rp 553,125,341,841.00
Kota Surabaya	Rp 2,088,869,968,843.00

LAMPIRAN 4

Temuan Audit

BANTEN	
Kab. Lebak	4
Kab. Pandeglang	12
Kab. Serang	7
Kab. Tangerang	9
Kota Cilegon	7
Kota Serang	12
Kota Tangerang	8
Kota Tangerang Selatan	10
DKI JAKARTA	
DKI Jakarta	16
JAWA BARAT	
Kab. Bandung	8
Kab. Bogor	9
Kab. Ciamis	6
Kab. Cianjur	8
Kab. Cirebon	7
Kab. Garut	6
Kab. Indramayu	10
Kab. Karawang	9
Kab. Kuningan	5
Kab. Majalengka	6
Kab. Subang	5
Kab. Sukabumi	8
Kab. Sumedang	6
Kab. Tasikmalaya	6
Kota Bandung	8
Kota Banjar	4
Kota Bekasi	9
Kota Cimahi	4
Kota Depok	10
JAWA TENGAH	
Kab. Banjarnegara	6
Kab. Banyumas	5
Kab. Boyolali	4
Kab. Brebes	7
Kab. Cilacap	5
Kab. Demak	4
Kab. Grobogan	4

Kab. Jepara	3
Kab. Karanganyar	5
Kab. Klaten	4
Kab. Kudus	4
Kab. Magelang	4
Kab. Pati	4
Kab. Pekalongan	5
Kab. Pemalang	6
Kab. Purbalingga	4
Kab. Purworejo	5
Kab. Rembang	6
Kab. Semarang	3
Kab. Sragen	4
Kab. Sukoharjo	4
Kab. Tegal	4
Kab. Temanggung	4
Kab. Wonogiri	4
Kab. Wonosobo	4
Kota Salatiga	5
Kota Surakarta	3
D.I. YOGYAKARTA	
Kab. Bantul	8
Kab. Gunung Kidul	5
Kab. Kulon Progo	8
Kab. Sleman	11
Kota Yogyakarta	14
JAWA TIMUR	
Kab. Bangkalan	6
Kab. Banyuwangi	5
Kab. Blitar	5
Kab. Bojonegoro	14
Kab. Bondowoso	5
Kab. Gresik	6
Kab. Jember	7
Kab. Jombang	12
Kab. Kediri	6
Kab. Lamongan	6
Kab. Magetan	8
Kab. Nganjuk	6
Kab. Ngawi	7
Kab. Pacitan	8
Kab. Pamekasan	5

Kab. Pasuruan	9
Kab. Ponorogo	5
Kab. Probolinggo	5
Kab. Sampang	6
Kab. Sidoarjo	5
Kab. Situbondo	7
Kab. Sumenep	5
Kab. Trenggalek	4
Kab. Tuban	9
Kab. Tulungagung	5
Kota Batu	5
Kota Blitar	6
Kota Malang	5
Kota Mojokerto	8
Kota Surabaya	5

LAMPIRAN 5

Umur Pemerintah Daerah

BANTEN	
Kab. Lebak	68
Kab. Pandeglang	68
Kab. Serang	68
Kab. Tangerang	68
Kota Cilegon	19
Kota Serang	11
Kota Tangerang	25
Kota Tangerang Selatan	10
DKI JAKARTA	
DKI Jakarta	73
JAWA BARAT	
Kab. Bandung	68
Kab. Bogor	68
Kab. Ciamis	68
Kab. Cianjur	68
Kab. Cirebon	68
Kab. Garut	68
Kab. Indramayu	68
Kab. Karawang	68
Kab. Kuningan	68
Kab. Majalengka	68
Kab. Subang	50
Kab. Sukabumi	68
Kab. Sumedang	68
Kab. Tasikmalaya	68
Kota Bandung	31
Kota Banjar	26
Kota Bekasi	22
Kota Cimahi	43
Kota Depok	27
JAWA TENGAH	
Kab. Banjarnegara	68
Kab. Banyumas	68
Kab. Boyolali	68
Kab. Brebes	68
Kab. Cilacap	68
Kab. Demak	68
Kab. Grobogan	68

Kab. Jepara	68
Kab. Karanganyar	68
Kab. Klaten	68
Kab. Kudus	68
Kab. Magelang	68
Kab. Pati	68
Kab. Pekalongan	68
Kab. Pemalang	68
Kab. Purbalingga	68
Kab. Purworejo	68
Kab. Rembang	68
Kab. Semarang	68
Kab. Sragen	68
Kab. Sukoharjo	68
Kab. Tegal	68
Kab. Temanggung	68
Kab. Wonogiri	68
Kab. Wonosobo	68
Kota Salatiga	68
Kota Surakarta	68
D.I. YOGYAKARTA	
Kab. Bantul	68
Kab. Gunung Kidul	68
Kab. Kulon Progo	68
Kab. Sleman	68
Kota Yogyakarta	68
JAWA TIMUR	
Kab. Bangkalan	68
Kab. Banyuwangi	68
Kab. Blitar	68
Kab. Bojonegoro	68
Kab. Bondowoso	68
Kab. Gresik	44
Kab. Jember	68
Kab. Jombang	68
Kab. Kediri	68
Kab. Lamongan	68
Kab. Magetan	68
Kab. Nganjuk	68
Kab. Ngawi	68
Kab. Pacitan	68
Kab. Pamekasan	68

Kab. Pasuruan	68
Kab. Ponorogo	68
Kab. Probolinggo	68
Kab. Sampang	68
Kab. Sidoarjo	68
Kab. Situbondo	46
Kab. Sumenep	68
Kab. Trenggalek	68
Kab. Tuban	68
Kab. Tulungagung	68
Kota Batu	25
Kota Blitar	68
Kota Malang	68
Kota Mojokerto	68
Kota Surabaya	68

LAMPIRAN 6

Spesialisasi Pekerjaan

BANTEN	
Kab. Lebak	1
Kab. Pandeglang	1
Kab. Serang	1
Kab. Tangerang	1
Kota Cilegon	0
Kota Serang	0
Kota Tangerang	0
Kota Tangerang Selatan	0
DKI JAKARTA	
DKI Jakarta	1
JAWA BARAT	
Kab. Bandung	0
Kab. Bogor	0
Kab. Ciamis	1
Kab. Cianjur	0
Kab. Cirebon	0
Kab. Garut	0
Kab. Indramayu	0
Kab. Karawang	0
Kab. Kuningan	0
Kab. Majalengka	1
Kab. Subang	0
Kab. Sukabumi	1
Kab. Sumedang	1
Kab. Tasikmalaya	0
Kota Bandung	0
Kota Banjar	0
Kota Bekasi	0
Kota Cimahi	1
Kota Depok	0
JAWA TENGAH	
Kab. Banjarnegara	0
Kab. Banyumas	0
Kab. Boyolali	0
Kab. Brebes	1
Kab. Cilacap	0
Kab. Demak	0
Kab. Grobogan	1

Kab. Jepara	1
Kab. Karanganyar	1
Kab. Klaten	0
Kab. Kudus	0
Kab. Magelang	0
Kab. Pati	1
Kab. Pekalongan	0
Kab. Pemalang	1
Kab. Purbalingga	1
Kab. Purworejo	1
Kab. Rembang	0
Kab. Semarang	0
Kab. Sragen	0
Kab. Sukoharjo	1
Kab. Tegal	0
Kab. Temanggung	0
Kab. Wonogiri	0
Kab. Wonosobo	1
Kota Salatiga	1
Kota Surakarta	0
D.I. YOGYAKARTA	
Kab. Bantul	0
Kab. Gunung Kidul	0
Kab. Kulon Progo	0
Kab. Sleman	0
Kota Yogyakarta	0
JAWA TIMUR	
Kab. Bangkalan	0
Kab. Banyuwangi	0
Kab. Blitar	1
Kab. Bojonegoro	0
Kab. Bondowoso	0
Kab. Gresik	0
Kab. Jember	1
Kab. Jombang	0
Kab. Kediri	0
Kab. Lamongan	1
Kab. Magetan	0
Kab. Nganjuk	1
Kab. Ngawi	0
Kab. Pacitan	1
Kab. Pamekasan	0

Kab. Pasuruan	1
Kab. Ponorogo	0
Kab. Probolinggo	0
Kab. Sampang	1
Kab. Sidoarjo	0
Kab. Situbondo	0
Kab. Sumenep	0
Kab. Trenggalek	1
Kab. Tuban	0
Kab. Tulungagung	1
Kota Batu	1
Kota Blitar	0
Kota Malang	0
Kota Mojokerto	1
Kota Surabaya	0

LAMPIRAN 7

Jumlah Penduduk

BANTEN	
Kab. Lebak	1,295,810
Kab. Pandeglang	1,209,011
Kab. Serang	1,501,501
Kab. Tangerang	3,692,693
Kota Cilegon	431,305
Kota Serang	677,804
Kota Tangerang	2,185,304
Kota Tangerang Selatan	1,696,308
DKI JAKARTA	
DKI Jakarta	10,467,629
JAWA BARAT	
Kab. Bandung	3,717,291
Kab. Bogor	5,840,907
Kab. Ciamis	1,188,629
Kab. Cianjur	2,260,620
Kab. Cirebon	2,176,213
Kab. Garut	2,606,399
Kab. Indramayu	1,719,187
Kab. Karawang	2,336,009
Kab. Kuningan	1,074,497
Kab. Majalengka	1,199,300
Kab. Subang	1,579,018
Kab. Sukabumi	2,460,693
Kab. Sumedang	1,149,906
Kab. Tasikmalaya	1,751,295
Kota Bandung	2,503,708
Kota Banjar	182,819
Kota Bekasi	2,931,897
Kota Cimahi	607,811
Kota Depok	2,330,333
JAWA TENGAH	
Kab. Banjarnegara	918,219
Kab. Banyumas	1,679,124
Kab. Boyolali	979,799
Kab. Brebes	1,802,829
Kab. Cilacap	1,719,504
Kab. Demak	1,151,796
Kab. Grobogan	1,371,610

Kab. Jepara	1,240,600
Kab. Karanganyar	879,078
Kab. Klaten	1,171,411
Kab. Kudus	861,430
Kab. Magelang	1,279,625
Kab. Pati	1,253,299
Kab. Pekalongan	891,892
Kab. Pemalang	1,299,724
Kab. Purbalingga	925,193
Kab. Purworejo	716,477
Kab. Rembang	633,584
Kab. Semarang	1,040,629
Kab. Sragen	887,889
Kab. Sukoharjo	885,205
Kab. Tegal	1,437,225
Kab. Temanggung	765,594
Kab. Wonogiri	957,106
Kab. Wonosobo	787,384
Kota Salatiga	191,571
Kota Surakarta	517,887
D.I. YOGYAKARTA	
Kab. Bantul	1,006,692
Kab. Gunung Kidul	736,210
Kab. Kulon Progo	425,758
Kab. Sleman	1,206,714
Kota Yogyakarta	427,498
JAWA TIMUR	
Kab. Bangkalan	978,892
Kab. Banyuwangi	1,609,677
Kab. Blitar	1,157,500
Kab. Bojonegoro	1,246,927
Kab. Bondowoso	772,297
Kab. Gresik	1,299,024
Kab. Jember	2,440,714
Kab. Jombang	1,258,618
Kab. Kediri	1,568,113
Kab. Lamongan	1,188,913
Kab. Magetan	628,924
Kab. Nganjuk	1,051,900
Kab. Ngawi	830,090
Kab. Pacitan	554,394
Kab. Pamekasan	871,497

Kab. Pasuruan	1,616,578
Kab. Ponorogo	870,705
Kab. Probolinggo	1,162,092
Kab. Sampang	968,520
Kab. Sidoarjo	2,216,804
Kab. Situbondo	679,993
Kab. Sumenep	1,085,227
Kab. Trenggalek	694,902
Kab. Tuban	1,168,277
Kab. Tulungagung	1,035,290
Kota Batu	205,788
Kota Blitar	140,971
Kota Malang	866,118
Kota Mojokerto	128,282
Kota Surabaya	2,885,555

LAMPIRAN 8

Pengungkapan Laporan Keuangan

BANTEN	
Kab. Lebak	12
Kab. Pandeglang	17
Kab. Serang	15
Kab. Tangerang	13
Kota Cilegon	21
Kota Serang	19
Kota Tangerang	23
Kota Tangerang Selatan	19
DKI JAKARTA	
DKI Jakarta	22
JAWA BARAT	
Kab. Bandung	20
Kab. Bogor	25
Kab. Ciamis	25
Kab. Cianjur	16
Kab. Cirebon	20
Kab. Garut	20
Kab. Indramayu	19
Kab. Karawang	23
Kab. Kuningan	19
Kab. Majalengka	20
Kab. Subang	18
Kab. Sukabumi	19
Kab. Sumedang	16
Kab. Tasikmalaya	20
Kota Bandung	15
Kota Banjar	19
Kota Bekasi	18
Kota Cimahi	17
Kota Depok	21
JAWA TENGAH	
Kab. Banjarnegara	18
Kab. Banyumas	18
Kab. Boyolali	19
Kab. Brebes	18
Kab. Cilacap	14
Kab. Demak	20
Kab. Grobogan	19

Kab. Jepara	18
Kab. Karanganyar	23
Kab. Klaten	20
Kab. Kudus	19
Kab. Magelang	20
Kab. Pati	20
Kab. Pekalongan	17
Kab. Pemalang	21
Kab. Purbalingga	20
Kab. Purworejo	20
Kab. Rembang	21
Kab. Semarang	19
Kab. Sragen	20
Kab. Sukoharjo	21
Kab. Tegal	17
Kab. Temanggung	21
Kab. Wonogiri	20
Kab. Wonosobo	19
Kota Salatiga	19
Kota Surakarta	21
D.I. YOGYAKARTA	
Kab. Bantul	13
Kab. Gunung Kidul	20
Kab. Kulon Progo	19
Kab. Sleman	23
Kota Yogyakarta	19
JAWA TIMUR	
Kab. Bangkalan	22
Kab. Banyuwangi	21
Kab. Blitar	18
Kab. Bojonegoro	18
Kab. Bondowoso	20
Kab. Gresik	20
Kab. Jember	21
Kab. Jombang	20
Kab. Kediri	19
Kab. Lamongan	17
Kab. Magetan	20
Kab. Nganjuk	16
Kab. Ngawi	18
Kab. Pacitan	22
Kab. Pamekasan	21

Kab. Pasuruan	21
Kab. Ponorogo	19
Kab. Probolinggo	20
Kab. Sampang	17
Kab. Sidoarjo	18
Kab. Situbondo	20
Kab. Sumenep	18
Kab. Trenggalek	17
Kab. Tuban	21
Kab. Tulungagung	22
Kota Batu	18
Kota Blitar	16
Kota Malang	17
Kota Mojokerto	17
Kota Surabaya	19

LAMPIRAN 9

Jumlah Anggota DPRD

BANTEN	
Kab. Lebak	50
Kab. Pandeglang	50
Kab. Serang	45
Kab. Tangerang	50
Kota Cilegon	35
Kota Serang	45
Kota Tangerang	50
Kota Tangerang Selatan	50
DKI JAKARTA	
DKI Jakarta	106
JAWA BARAT	
Kab. Bandung	50
Kab. Bogor	50
Kab. Ciamis	50
Kab. Cianjur	50
Kab. Cirebon	50
Kab. Garut	50
Kab. Indramayu	50
Kab. Karawang	50
Kab. Kuningan	50
Kab. Majalengka	50
Kab. Subang	50
Kab. Sukabumi	50
Kab. Sumedang	50
Kab. Tasikmalaya	50
Kota Bandung	50
Kota Banjar	25
Kota Bekasi	50
Kota Cimahi	45
Kota Depok	50
JAWA TENGAH	
Kab. Banjarnegara	45
Kab. Banyumas	50
Kab. Boyolali	45
Kab. Brebes	50
Kab. Cilacap	50
Kab. Demak	50
Kab. Grobogan	50

Kab. Jepara	50
Kab. Karanganyar	45
Kab. Klaten	50
Kab. Kudus	45
Kab. Magelang	50
Kab. Pati	50
Kab. Pekalongan	45
Kab. Pemalang	50
Kab. Purbalingga	45
Kab. Purworejo	45
Kab. Rembang	45
Kab. Semarang	45
Kab. Sragen	45
Kab. Sukoharjo	45
Kab. Tegal	50
Kab. Temanggung	45
Kab. Wonogiri	45
Kab. Wonosobo	45
Kota Salatiga	25
Kota Surakarta	45
D.I. YOGYAKARTA	
Kab. Bantul	45
Kab. Gunung Kidul	45
Kab. Kulon Progo	40
Kab. Sleman	50
Kota Yogyakarta	40
JAWA TIMUR	
Kab. Bangkalan	50
Kab. Banyuwangi	50
Kab. Blitar	50
Kab. Bojonegoro	50
Kab. Bondowoso	45
Kab. Gresik	50
Kab. Jember	50
Kab. Jombang	50
Kab. Kediri	50
Kab. Lamongan	50
Kab. Magetan	45
Kab. Nganjuk	45
Kab. Ngawi	45
Kab. Pacitan	40
Kab. Pamekasan	45

Kab. Pasuruan	50
Kab. Ponorogo	45
Kab. Probolinggo	30
Kab. Sampang	45
Kab. Sidoarjo	50
Kab. Situbondo	45
Kab. Sumenep	50
Kab. Trenggalek	45
Kab. Tuban	50
Kab. Tulungagung	50
Kota Batu	25
Kota Blitar	25
Kota Malang	45
Kota Mojokerto	25
Kota Surabaya	50

LAMPIRAN 10

Luas Wilayah

BANTEN	
Kab. Lebak	3426.56
Kab. Pandeglang	2746.89
Kab. Serang	1734.28
Kab. Tangerang	1011.86
Kota Cilegon	175.50
Kota Serang	266.71
Kota Tangerang	153.93
Kota Tangerang Selatan	147.19
DKI JAKARTA	
DKI Jakarta	662.33
JAWA BARAT	
Kab. Bandung	1767.96
Kab. Bogor	2710.62
Kab. Ciamis	1414.71
Kab. Cianjur	3840.16
Kab. Cirebon	984.52
Kab. Garut	3074.07
Kab. Indramayu	2040.11
Kab. Karawang	1652.20
Kab. Kuningan	1110.56
Kab. Majalengka	1204.24
Kab. Subang	1893.95
Kab. Sukabumi	4145.70
Kab. Sumedang	1518.33
Kab. Tasikmalaya	2551.19
Kota Bandung	167.67
Kota Banjar	113.49
Kota Bekasi	206.61
Kota Cimahi	39.27
Kota Depok	200.29
JAWA TENGAH	
Kab. Banjarnegara	1023.73
Kab. Banyumas	1335.30
Kab. Boyolali	1008.45
Kab. Brebes	1902.37
Kab. Cilacap	2124.47
Kab. Demak	900.12
Kab. Grobogan	2013.86

Kab. Jepara	1059.25
Kab. Karanganyar	775.44
Kab. Klaten	658.22
Kab. Kudus	425.15
Kab. Magelang	1102.93
Kab. Pati	1489.19
Kab. Pekalongan	837.00
Kab. Pemalang	1118.03
Kab. Purbalingga	677.55
Kab. Purworejo	1091.49
Kab. Rembang	887.13
Kab. Semarang	950.21
Kab. Sragen	941.54
Kab. Sukoharjo	489.12
Kab. Tegal	876.10
Kab. Temanggung	837.71
Kab. Wonogiri	1793.67
Kab. Wonosobo	981.41
Kota Salatiga	57.36
Kota Surakarta	46.01
D.I. YOGYAKARTA	
Kab. Bantul	508.13
Kab. Gunung Kidul	1431.42
Kab. Kulon Progo	586.28
Kab. Sleman	574.82
Kota Yogyakarta	32.50
JAWA TIMUR	
Kab. Bangkalan	1001.44
Kab. Banyuwangi	5782.40
Kab. Blitar	1336.48
Kab. Bojonegoro	2198.79
Kab. Bondowoso	1525.97
Kab. Gresik	1191.25
Kab. Jember	3092.34
Kab. Jombang	1115.09
Kab. Kediri	1386.05
Kab. Lamongan	1782.05
Kab. Magetan	688.84
Kab. Nganjuk	1224.25
Kab. Ngawi	1295.98
Kab. Pacitan	1389.92
Kab. Pamekasan	792.24

Kab. Pasuruan	1474.02
Kab. Ponorogo	1305.70
Kab. Probolinggo	1696.21
Kab. Sampang	1233.08
Kab. Sidoarjo	634.38
Kab. Situbondo	1669.87
Kab. Sumenep	1998.54
Kab. Trenggalek	1147.22
Kab. Tuban	1834.15
Kab. Tulungagung	1055.65
Kota Batu	136.74
Kota Blitar	32.57
Kota Malang	145.28
Kota Mojokerto	16.47
Kota Surabaya	350.54

LAMPIRAN 11

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.32179003
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.066
Test Statistik		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistiks Tolerance	Collinearity Statistiks VIF
1	(Constant)	5.071	17.545		.289	.773		
	Temuan_Audit_X2	.026	.117	.028	.220	.826	.701	1.427
	Sp_Pekerjaan_X4	-.537	.547	-.109	-.982	.329	.948	1.055
	LOG_X1	1.077	1.864	.109	.578	.565	.329	3.036
	LOG_X3	-.662	1.885	-.047	-.351	.726	.659	1.517
	LOG_X5	-1.228	1.736	-.160	-.707	.482	.227	4.405
	LOG_X6	5.660	5.764	.197	.982	.329	.289	3.456
	LOG_X7	.051	.721	.011	.071	.944	.487	2.055

a. Dependent Variable: Pengungkapan_LKPD_Y

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.014	.012		1.208	.230
	X1_2	-.011	.015	-.356	-.734	.465
	X2_2	.039	.027	.181	1.473	.144
	X3_2	.029	.026	.193	1.109	.271
	X4_2	.012	.008	.168	1.558	.123
	X5_2	.000	.000	-.429	-.816	.417
	X6_2	-.161	.094	-.494	-1.718	.090
	X7_2	.000	.009	.003	.024	.981

a. Dependent Variable: ABS_RES1

LAMPIRAN 12

Hasil Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.032	.255		-.124	.901
	LOG_X1	-.010	.028	-.061	-.349	.728
	LOG_X2	.033	.028	.140	1.182	.240
	LOG_X3	.027	.029	.121	.953	.343
	Sp_Pekerjaan_X4	.015	.008	.191	1.812	.074
	LOG_X5	.062	.026	.507	2.356	.021
	LOG_X6	-.162	.087	-.354	-1.869	.065
	LOG_X7	.002	.011	.026	.178	.859

a. Dependent Variable: ABS_RES

LAMPIRAN 13

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LOG_X1	90	10.82	13.25	12.1560	.23965
LOG_X2	90	.48	1.20	.7785	.15992
LOG_X3	90	1.00	1.86	1.7730	.16757
Sp_Pekerjaan_X4	90	0	1	.36	.481
LOG_X5	90	5.11	7.02	6.0454	.30991
LOG_X6	90	1.40	2.03	1.6632	.08270
LOG_X7	90	1.22	3.76	2.9043	.50982
LOG_Y	90	1.08	1.40	1.2778	.05683
Valid N (listwise)	90				